



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2017

Pengantar

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat ini disusun sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas atas pelaksanaan visi, misi, dan tupoksi yang diembannya kepada publik, yang bersifat tahunan sebagaimana diamanatkan dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Diktum Ketiga Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Dilingkungan Pemerintahan serta Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Laporan dimaksud memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Program serta kegiatan yang telah dilaksanakan dimaksudkan sebagai bentuk peran serta aktif Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Diharapkan apa yang telah dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu tersebut dapat memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Disisi lain, LAKIP ini dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama tahun 2017 agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang, Januari 2018
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010

Ringkasan Eksekutif

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan 2017 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2017. Penyusunan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2017. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*), sebagaimana termuat dalam Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan *good governance*, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran, serta Visi dan Misi yang secara sistematis telah dituangkan dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021. Visi tersebut yakni sebagai "Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan", yang merupakan bagian dari Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD sebesar Rp. 361.958.573.304,- dengan Realisasi sebesar Rp. 335.323.949.259,- (92,64%) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan Program sebanyak 17 (tujuh belas) program, Kegiatan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) kegiatan dan Paket Kegiatan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) paket kegiatan.

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada tahun 2017 sebesar Rp. 437.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.496.749.360,- (342,51 %).

Tabel Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

No.	Restribusi	Anggaran	Realisasi	%
1.	Laboratorium	210.000.000	445.836.360	212,30
2.	Alat-alat berat	227.000.000	1.050.913.000	462,95
	Jumlah	437.000.000	1.496.749.360	342,51

Dana APBD SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar :

Tabel Pagu Dana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

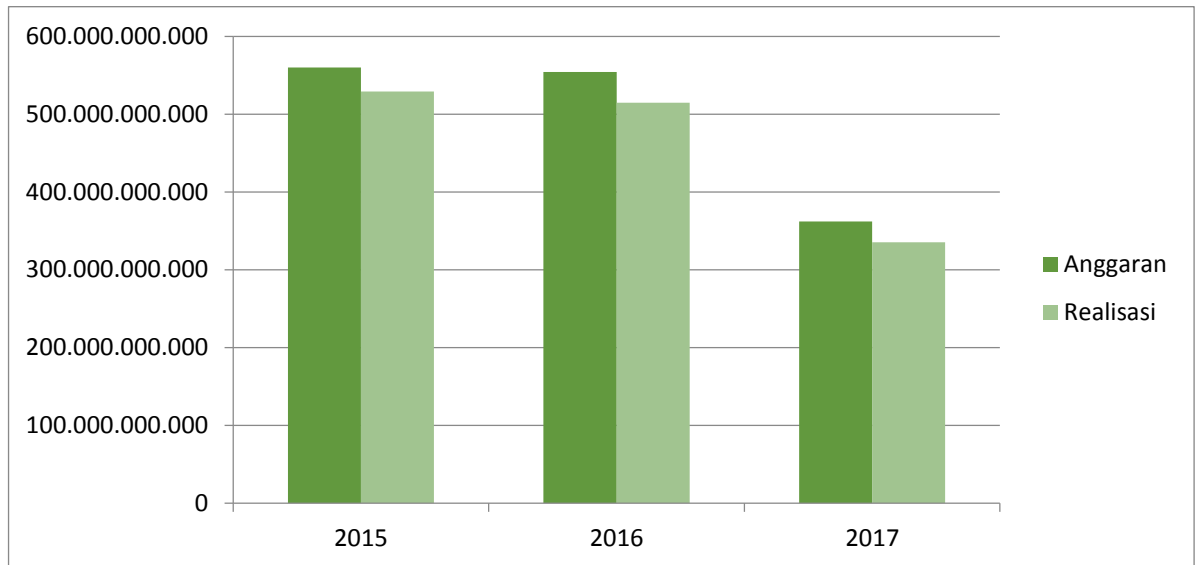
No.	Uraian	Rencana	Realisasi	Sisa	%
1.	Belanja Tidak Langsung	34.679.823.067	34.403.521.642	276.301.425	99,20
2.	Belanja Langsung	327.278.750.237	300.920.427.617	26.358.322.620	91,95
	Jumlah	361.958.573.304	335.323.949.259	26.634.624.045	92,64

Dari tahun ketahun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mendapatkan alokasi pendanaan melalui APBD daerah yang dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Tabel Rencana dan Realisasi 2015, 2016 dan 2017

Tahun Anggaran	Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi		
			Fisik	Keuangan	
				Rp.	%
2015	Belanja Tidak Langsung	37.480.605.967	100	36.493.101.212	97,37
	Belanja Langsung	522.500.980.922	97,53	492.682.424.909	94,29
	Total	559.981.586.909	97,66	529.175.526.121	94,49
2016	Belanja Tidak Langsung	37.061.878.434	97.19	36.020.421.451	97.19
	Belanja Langsung	517.082.402.944	93.49	478.458.421.866	92.53
	Total	554.144.281.378	95.34	514.478.843.317	92.84
2017	Belanja Tidak Langsung	34.679.823.067	100	34.403.521.642	99,20
	Belanja Langsung	327.278.750.237	96.97	300.920.427.617	91,95
	Total	361.958.573.304	98,51	335.323.949.259	92,64

Dari tabel diatas dapat dilihat perbandingan pendanaan yang didapat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2015, 2016 dan 2017 sebagai berikut:



Gambar Diagram Rencana dan Realisasi 2015 s/d 2017

Secara rinci hasil evaluasi capaian kinerja fisik terhadap 17 (tujuh belas) program dinas, diketahui bahwa terdapat 17 (tujuh belas) dari hasil evaluasi **capaian kinerja fisik** terhadap 17 (tujuh belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 17 (tujuh belas) program yang berkinerja sangat baik.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja keuangan terhadap 17 (tujuh belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 13 (tiga belas) program yang berkinerja sangat baik dan 4 (empat) program yang berkinerja baik.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Provinsi, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2016 terdapat 17 (tujuh belas) program terdiri dari 12 (dua belas) program strategis dan 5 program pendukung. *Out put* dan *out come* dari program-program strategis tersebut mempunyai korelasi / keterkaitan langsung dengan indikator kinerja pemerintah Provinsi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya Manusia Organisasi	5
1.4 Aspek Strategis Organisasi	7
1.5 Isu Strategis.....	9
1.6 Dasar Hukum.....	10
1.7 Sistematika Laporan	11
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1 Rencana Strategis	17
2.2 Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2 Capaian Kinerja Bidang / UPT.....	53
3.3 Perbandingan Kinerja Organisasi	59
3.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan	61
3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	63

3.6 Realisasi Anggaran.....	65
-----------------------------	----

BAB IV PENUTUP	85
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Eselon II
2. Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV
3. Penghargaan – penghargaan yang diperoleh Perangkat Daerah selama tahun 2017
4. Print Out Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2017 dari aplikasi E-Sakip

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Jumlah Pegawai Tahun 2017	5
Tabel 1. 2 Data Jumlah Pegawai Berdasarkan tingkat pendidikan	5
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin	6
Tabel 2. 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.....	15
Tabel 2. 2 Strategi dan Kebijakan Sasaran 1	19
Tabel 2. 3 Strategi dan Kebijakan Sasaran 2	19
Tabel 2. 4 Strategi dan Kebijakan Sasaran 3	20
Tabel 2. 5 Strategi dan Kebijakan Sasaran 4	20
Tabel 2. 6 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	21
Tabel 2. 7 Indikator Perjanjian Kinerja	22
Tabel 2. 8 Pagu Anggaran per Program Tahun 2017.....	22
Tabel 3. 1 Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017.....	24
Tabel 3. 2 Capaian Target Kinerja Tahun 2017	24
Tabel 3. 3 Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja.....	27
Tabel 3. 4 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Barat (Status Desember 2017).....	29
Tabel 3. 5 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional.....	37
Tabel 3. 6 Sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	40
Tabel 3. 7 Target dan Capaian Indikator Persentase Air Minum Tahun 2017	42
Tabel 3. 8 Program dan Kegiatan Pendukung Cakupan Air Minum Tahun 2017.....	42
Tabel 3. 9 Data Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota Tahun 2017	43
Tabel 3. 10 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.....	43
Tabel 3. 11 Indikator Cakupan Sanitasi	44
Tabel 3. 12 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional.....	44

Tabel 3. 13 Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Bidang Penataan Ruang	45
Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja	45
Tabel 3. 15 Kesesuaian Program RTRW Provinsi dengan Rencana Pembangunan	48
Tabel 3. 16 Capaian Indikator Kinerja Bidang Bina Marga	54
Tabel 3. 178 Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya	55
Tabel 3. 98 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang	56
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan	58
Tabel 3. 20 Perbandingan Kinerja Organisasi Tahun Lalu	59
Tabel 3. 2110 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Renstra	60
Tabel 3. 22 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional	60
Tabel 3. 23 11 Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2017	67
Tabel 3. 24 Realisasi Keuangan Tahun 2017	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017	5
Gambar 1. 2 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 1. 3 Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2017	7
Gambar 3. 1 Pembangunan Jalan Provinsi.....	26
Gambar 3. 2 Target dan Realisasi Per Tahun Jalan Mantap Menurut Renstra Tahun 2016-2021.....	28
Gambar 3. 3 Jembatan Lolong.....	29
Gambar 3. 4 Perbandingan Kemantapan Jalan Nasional dengan Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2015 – 2017	38
Gambar 3. 5 Gedung Kebudayaan sebagai Salah Satu Gedung Strategis	39
Gambar 3. 6 Digaram Target dan Capaian Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2016 – 2021	46
Gambar 3. 7 Capaian Kinerja Indikator	61
Gambar 3. 8 Persentase Belanja Tahun Anggaran 2017	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan nasional dan daerah. Dalam tataran nasional, pemerintah memiliki visi yaitu terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong. Sementara sebagai bagian dari Provinsi Sumatera Barat, pemerintah memiliki visi yaitu Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau yang selanjutnya disingkat dengan Dinas PU dan Penataan Ruang dibentuk pada berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dinas PU dan Penataan Ruang sendiri memiliki peran strategis dalam mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel perlu menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016. Laporan ini memuat analisis kinerja dan keuangan program kerja perangkat

daerah pada Dinas PU dan Penataan Ruang yang dilaksanakan selama tahun 2017 sebanyak 17 program dan 88 kegiatan.

Dalam penyusunan Lakip Dinas PU dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 8 Tahun 2016 Dinas PU dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas PU dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Pembinaan dan fasilitasi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lingkup provinsi dan kabupaten/kota
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang Keciaptakaryaan, Pelaksanaan Jalan serta Bidang Penataan Ruang; dan
6. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

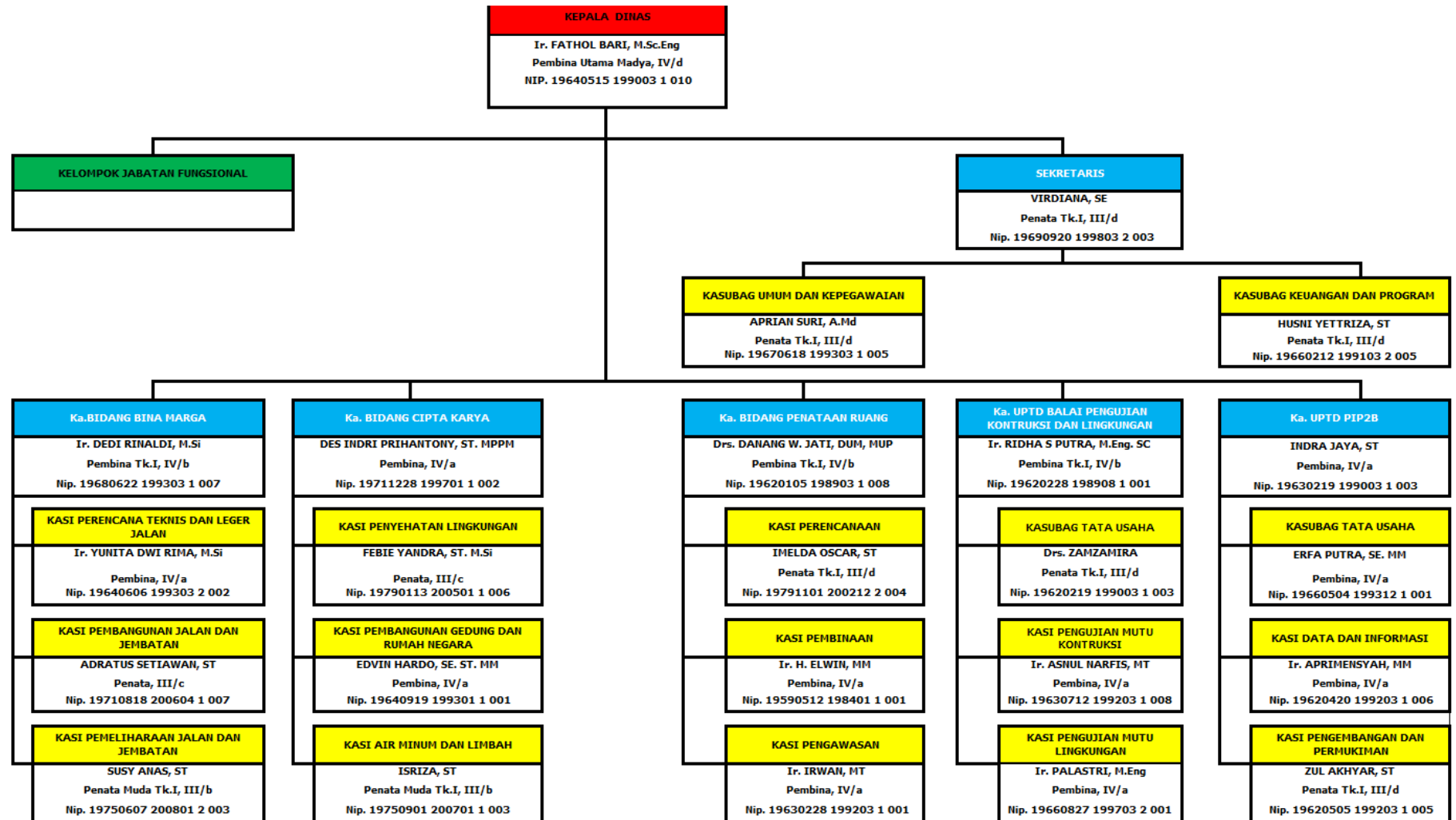
Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dibentuk susunan organisasi dinas yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Marga
 - 3.1. Seksi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan
 - 3.2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

- 3.3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- 4. Bidang Cipta Karya
 - 4.1. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - 4.2. Seksi Pembangunan Gedung dan Rumah Negara
 - 4.3. Seksi Air Minum dan Limbah
- 5. Bidang Penataan Ruang
 - 5.1. Seksi Perencanaan
 - 5.2. Seksi Pembinaan
 - 5.3. Seksi Pengawasan
- 6. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan
 - 6.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 6.2. Seksi Pengujian Mutu Konstruksi
 - 6.3. Seksi Pengujian Mutu Lingkungan
- 7. UPTD PIP2B
 - 7.1. Sub Bagian Tata Usaha
 - 7.2. Seksi Data dan Informasi
 - 7.3. Seksi Pengembangan dan Permukiman
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

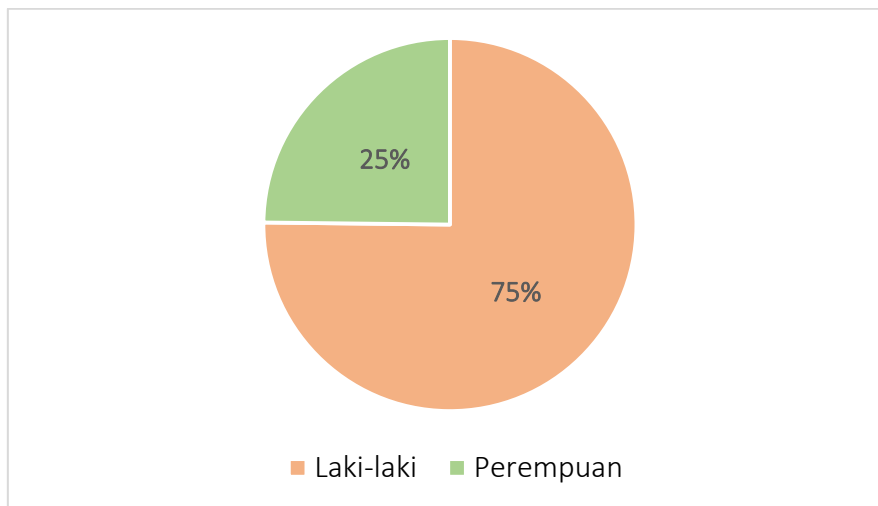
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat mempunyai UPTD yang melaksanakan sebagian tugas teknis di bidang pengujian konstruksi dan lingkungan dan PIP2PB. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. dilengkapi juga dengan beberapa kelompok jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Secara lengkap bagan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat terlihat berikut ini.

**Bagan Struktur Organisasi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Sumatera Barat**



1.3. Sumber Daya Manusia Organisasi

Dalam melaksanakan pekerjaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh 404 (Empat Ratus Empat) orang Pegawai Negeri Sipil dengan rincian sebagaimana pada diagram dibawah ini.



Gambar 1. 4
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, berdasarkan Jenis Kelamin.

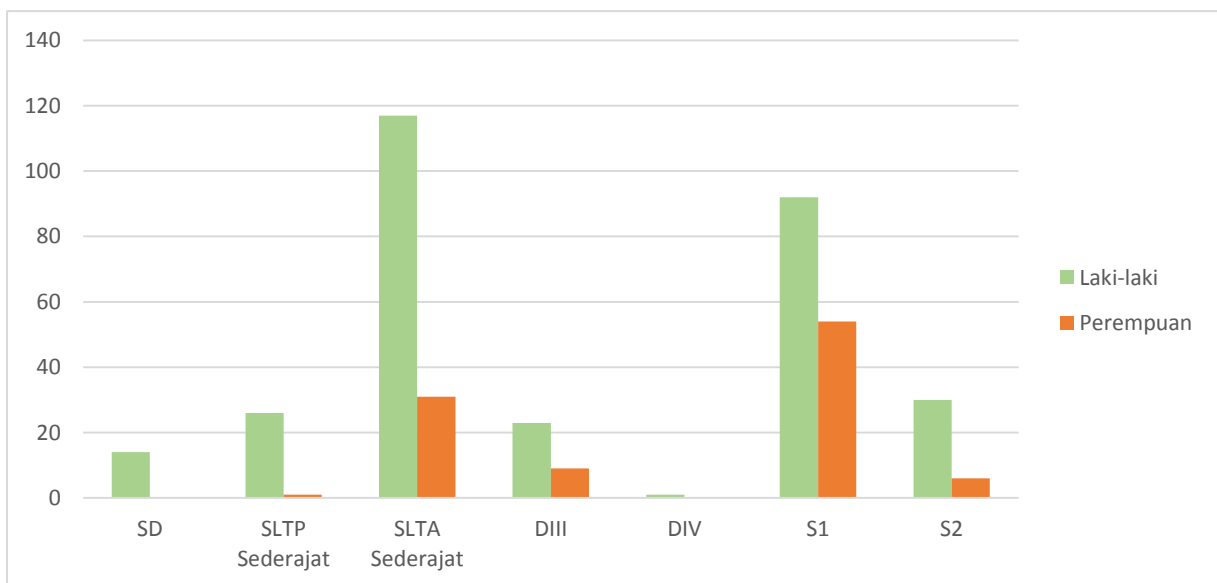
Tabel 1. 4
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
Laki-laki	303 orang	75%
Perempuan	101 orang	25%

Tabel 1. 5
Data Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SD	14	0	14
SLTP Sederajat	26	1	22

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
SLTA Sederajat	117	31	148
DIII	23	9	32
DIV	1	0	1
S1	92	54	146
S2	30	6	36
Jumlah	303	101	404

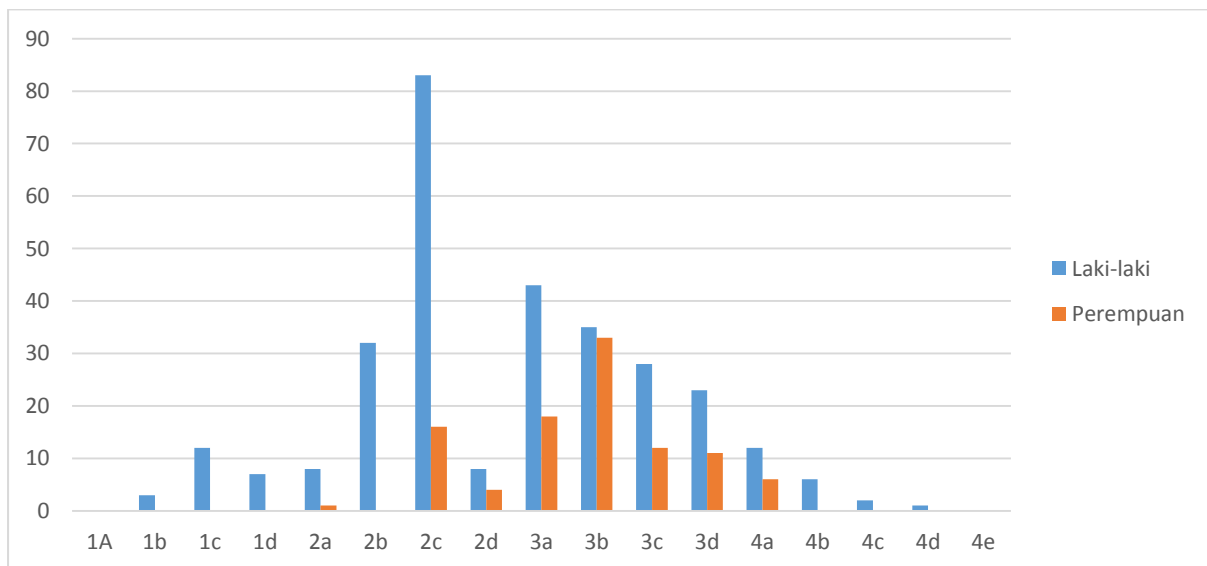


Gambar 1. 5
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017
berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1. 6 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Jumlah Pegawai		
	Laki-laki	Perempuan	Total
1A	0	0	0
1b	3	0	3
1c	12	0	12
1d	7	0	8
2a	8	1	9
2b	32	0	32

2c	83	16	99
2d	8	4	12
3a	43	18	61
3b	35	33	68
3c	28	12	40
3d	23	11	37
4a	12	6	18
4b	6	0	6
4c	2	0	2
4d	1	0	1
4e	0	0	0



Gambar 1. 6
Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Golongan Tahun 2017

1.4. Aspek Strategis Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi memegang peranan penting dalam pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat yang kemudian berkontribusi bagi peningkatan ekonomi masyarakat terutama melalui pembangunan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, air minum, air limbah, pembangunan gedung atau bangunan negara serta penataan ruang. Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat

memberikan dampak yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dilakukan dengan pembangunan dan peningkatan pada jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir, meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan, serat secara umum meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. Dengan adanya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing wilayah serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai dengan target nasional dan sebagaimana juga tertera *universal access* terkait prasarana air minum dan sanitasi yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi yang layak, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan akan akses air minum dan sanitasi yang layak di Provinsi Sumatera Barat.

Peran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang lainnya adalah dalam penyediaan pembangunan gedung negara dalam rangka rekonstruksi bangunan pasca gempa 2009. Selain itu, Dinas PUPR juga berperan dalam pembangunan Main Stadium Sumatera Barat, Gedung Kebudayaan dan Convention Hall.

Penataan Ruang memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai daya dukung lingkungan dan berkelanjutan. Pada Tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan rencana tata ruang pada kawasan strategis lingkungan hidup yaitu Danau Maninjau. Selain itu Dinas PUPUR juga melakukan revisi RTRW serta beberapa rencana tata ruang lainnya.

Adapun program-program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur yaitu Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas PUPR tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik semata, namun juga mengurangi kesenjangan antar kawasan, meningkatkan kualitas hidup dan pemerataan pembangunan.

1.5. Isu Strategis

Pembangunan infrastruktur di Sumatera Barat menghadapi tantangan berat untuk terus berbenah menuju infrastruktur yang andal. Hal ini disebabkan karena pembangunan infrastruktur yang tidak sejalan dengan pertumbuhan penduduk Sumatera Barat.

Adapun upaya peningkatan konektivitas dan aksesibilitas masih mengalami beberapa permasalahan, yaitu antara lain : (1) masih tingginya panjang jalan yang belum terhubung antar wilayah dan terisolir, (2) kemantapan jalan provinsi sebesar 71,05% dengan deviasi yang cukup jauh dari kemantapan jalan nasional (91,48%) sehingga perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan agar mencapai setidaknya 75% pada Tahun 2021 (akhir periode Renstra).

Adapun upaya pemenuhan kebutuhan dasar berupa akses air minum dan sanitasi layak masih mengalami berbagai kendala, yaitu (1) Masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat; (2) perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembangunan dan pemeliharaan aset; (3) kesulitan penyediaan lahan yang layak dan sesuai dengan kriteria pembangunan infrastruktur; (4) terbatasnya ketersediaan dana pembangunan.

Dalam bidang Penataan Ruang, terdapat beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian, yaitu (1) Masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan dan belum terbangunnya kemitraan yang kuat dengan pemangku kepentingan utama pemanfaatan ruang; (2) rendahnya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang; (3) terbatasnya pedoman acuan pemanfaatan ruang dan upaya memasyarakatkannya.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global. Secara regulasi, hal tersebut telah memiliki payung hukum yang jelas dengan adanya UU Jasa Konstruksi mengenai klasifikasi dan kualifikasi, pelatihan tenaga kerja konstruksi, sertifikasi kompetensi kerja, registrasi pengalaman profesional, upah tenaga kerja konstruksi, dan pengaturan tenaga kerja konstruksi asing serta tanggung jawab profesi. Dengan demikian, Dinas PUPR perlu mengawasi implementasi Undang-undang tersebut dan terus membina sektor jasa konstruksi agar dapat semakin baik dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang andal.

Selain faktor eksternal tersebut, permasalahan juga harus dihadapi dari sisi internal organisasi. Sesuai dengan Pergub No. 53 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat yang melakukan penggabungan tupoksi keuangan dan program dibawah Subag Keuangan dan Program dirasa terlalu berat dalam mengawasi kedua tupoksi tersebut secara bersamaan. Hal ini diperkuat dengan adanya Permendagri Nomor 106 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota tipe B memiliki sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 subbagian.

1.6. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai Undang-undang;
2. Ketetapan MPR-RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 53/2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat

1.7. Sistematika Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja anggaran dan perjanjian kinerja tahun 2017. Lebih lanjut diuraikan pula mengenai pengukuran kinerja organisasi

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Pada subbab Capaian Kinerja Organisasi disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Sedangkan pada subbab Realisasi Anggaran diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan dimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi Gubernur Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021 adalah :

Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera

Sejalan dengan pencapaian visi tersebut, didukung dengan 5 (lima) misi yakni :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya, berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah,
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional,
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi,
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional, global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah,
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Terdapat 10 prioritas pembangunan Sumatera Barat tahun 2016-2021;

1. Pembangunan mental dan pengalaman agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat,
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Kedaulatan pangan dan pengembangan agribisnis
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, dan investasi
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan

8. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal
9. Pengembangan energi dan pembangunan infrastruktur
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memiliki peran dalam RPJMD 2016-2021 sebagai berikut :

- Misi 5** : **Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**
- Tujuan 1** : **Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah**
- Sasaran 1** : **Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah**
- Strategi 1** : 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi
2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah
- Arah Kebijakan** : 1. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi
2. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi
3. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah
4. Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)
- Sasaran 5** : **Meningkatnya ketersediaan prasarana dan sarana umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, lingkungan dan bangunan gedung**
- Strategi** : 1. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan
2. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan

- Arah Kebijakan : 1. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh.
2. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase
3. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
- Tujuan 2 : **Meningkatkan Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.**
- Sasaran 1 : **Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang**
- Strategi 1. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW
2. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku
- Arah Kebijakan 1. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata ruang.
2. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi
3. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang
4. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan

Berdasarkan Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Sumatera Barat Tahun 2016-2021 tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki peran dalam mendukung Misi 5, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Tabel 2. 9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam RJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Infrastruktur dan Pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah Meningkatkan	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan provinsi 2. Meningkatkan kerjasama pembangunan dalam rangka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan provinsi 6. Rehabilitasi jalan dan jembatan provinsi 7. Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan hubungan dan pengembangan wilayah Penyediaan dukungan untuk pembangunan infrastruktur prioritas dan strategis nasional (dukungan pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau dan lain-lain)
		Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 3. Membenahi prasarana dan sarana umum di kawasan pemukiman/perumahan dan lingkungan 4. Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan prasarana umum pada kawasan pemukiman/perumahan, lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana kawasan permukiman kumuh. 5. Pengembangan sistem pengelolaan air minum regional, tempat pembuangan akhir regional, dan drainase 6. Peningkatan kualitas dan penataan bangunan dan lingkungan
	Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya	Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan rencana tata ruang	<ol style="list-style-type: none"> 3. Meningkatkan pengawasan, pengendalian dan pembinaan dalam pemanfaatan ruang 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Penyusunan regulasi perencanaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan mengacu pada rencana tata

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	dukung dan daya tampung lingkungan.		<p>sesuai dengan RTRW</p> <p>4. Melakukan pengkajian dan penyempurnaan RTRW sesuai kebutuhan pembangunan dan aturan yang berlaku</p>	<p>ruang.</p> <p>6. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi</p> <p>7. Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian tata ruang</p> <p>8. Peningkatan keterkaitan antar pusat kegiatan sesuai dengan hirarki pengembangan sistim perkotaan</p>

2.1. Rencana Strategis

Berdasarkan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Barat serta Isu-Isu Strategis, maka Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan pemerintahan di Bidang Tata Ruang, Prasarana Jalan dan Permukiman lebih terarah dan terfokus kepada hasil yang akan dicapai, untuk menjalankan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Gubernur Sumatera Barat , yaitu:

Mewujudkan Infrastruktur yang handal, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Infrastruktur yang **handal** dapat diartikan sebagai tingkat kondisi ketersediaan prasarana jalan dan jembatan yang bermutu, menghubungkan antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat dan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini diperlukan untuk mendukung agenda prioritas pembangunan Gubernur yaitu meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Dengan meningkatnya koneksinya antar wilayah di Provinsi Sumatera Barat melalui prasarana jalan yang handal, maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, infrastruktur yang dimaksud juga mencakup aspek Keciptakarya yang berkualitas yang dapat diterjemahkan melalui penataan bangunan yang kokoh dan sesuai dengan fungsinya, cakupan pelayanan air bersih yang baik, dan peningkatan pelayanan sanitasi sehingga menghasilkan lingkungan permukiman yang nyaman dan asri. Adapun Penataan Ruang yang berkelanjutan dalam hal ini adalah tersedianya penataan ruang yang dapat dijadikan efisien, berkelanjutan dan konsisten sehingga dapat dijadikan acuan dan rujukan dalam kegiatan pembangunan guna terciptanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antar aspek-aspek pembangunan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan.

Berdasarkan visi tersebut, ditetapkan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Sumatera Barat, yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan jaringan jalan yang mantap dan berwawasan lingkungan.
2. Mewujudkan penataan bangunan yang aman dan nyaman.
3. Mewujudkan pelayanan penyediaan air minum dan sanitasi

4. Menciptakan penataan ruang yang berkelanjutan

2.1.1. Tujuan

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera memiliki 3 (tiga) tujuan yaitu sebagai berikut :

- a) Meningkatkan tata pemerintahan Dinas PUPR yang baik, bersih, transparan dan akuntabel
- b) Meningkatnya penyediaan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah
- c) Mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan

2.1.2. Sasaran

- a) Meningkatnya tata kelola organisasi

Adapun tata kelola organisasi Dinas PUPR mencakup kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi, kualitas pelayanan internal organisasi, kualitas penatausahaan keuangan, dan pengawasan internal organisasi.

- b) Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Salah satu indikator dalam tercapainya konektivitas dan aksesibilitas wilayah adalah meningkatnya kemantapan jalan. Kemantapan jalan merupakan definisi dalam penanganan jalan yang menyatakan kualitas fisik dan layanan jalan yang dianggap cukup untuk memenuhi syarat minimal bahwa suatu ruas jalan dapat dioperasikan dalam menjalankan fungsinya secara optimal.

- c) Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Adapun sarana dan prasarana umum dan aparatur meliputi penyediaan Bangunan Gedung Pemerintah, Rumah Negara dan Bangunan Strategis Lainnya yang aman dan nyaman serta untuk meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

- d) Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung.

Tercapainya kinerja penataan ruang yang tinggi seperti yang diatur dalam UU No 9 Tahun 2015 dan UU No. 26 Tahun 2007.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2021, perlu ditetapkan strategi dan kebijakan yaitu sebagai berikut.

Sasaran 1 Meningkatnya tata kelola organisasi

Untuk meningkatkan tata kelola organisasi dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut:

Tabel 2. 10 Strategi dan Kebijakan Sasaran 1

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan organisasi	Penyampaian dokumen perencanaan (Renstra, RKT, dan Perjanjian Kinerja) dan pelaporan organisasi dengan tepat waktu
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja organisasi
2	Meningkatkan kualitas pelayanan internal organisasi	Penyediaan data kepegawaian yang akurat
		Peningkatan layanan administrasi kepegawaian
		Peningkatan pengelolaan sarana prasarana
3	Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan	Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan
		Peningkatan kesesuaian pertanggungjawaban keuangan dengan aturan
4	Meningkatkan pengawasan internal organisasi	Peningkatan tindak lanjut temuan pemeriksaan
		Meningkatnya pejabat ASN yang mengisi LHKPN/LHKASN

Sasaran 2 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah

Untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2. 11 Strategi dan Kebijakan Sasaran 2

No	Strategi	Kebijakan
1	Pengurangan jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir	Pembangunan jalan yang belum terhubung antar daerah terisolir
2	Meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan	Pembangunan jalan menuju daerah wisata dan pelabuhan udara/laut
3	Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
		Peningkatan jalan

Sasaran 3 Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat

Untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparaturnya serta pelayanan dasar masyarakat dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2. 12 Strategi dan Kebijakan Sasaran 3

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman	Pembangunan dan rehabilitasi gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis
		Pemeriksaan laik fungsi oleh tim ahli bangunan gedung (TABG)
		Peningkatan kualitas tenaga teknis
2	Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Pembangunan infrastruktur air minum
		Pembangunan infrastruktur sanitasi

Sasaran 4 Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung

Untuk meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung dibutuhkan strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Tabel 2. 13 Strategi dan Kebijakan Sasaran 4

No	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatkan RTR yang berkekuatan hukum	Pengkajian dan penyempurnaan RTRW, RDTR dan PZ
		Penyediaan dikumen RTRW, RDTR dan PZ
		Penyediaan data spasial
2	Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan pembinaan pemanfaatan ruang
		Peningkatan kuantitas PPNS Tata Ruang

Tabel 2. 14 Indikator Kinerja OPD Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian setiap Tahun -						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	BB	BB	A	A	A
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	94.5%	95%	96%	97%	97%	98%	98%	98%
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	91,13% / 69%	70%	71%	72%	73%	74%	75%	75%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	22 unit	5 unit	8 unit	8 unit	3 unit	5 unit	3 unit	54 unit
		Persentase cakupan air minum	68%	70%	72%	75 %	80%	83%	86%	86%
		Persentase cakupan sanitasi	66,84%	72%	73%	75%	78%	79%	80%	80%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	79%	80%	81%	82%	83%	84%	86%	86%

2.2. Perjanjian Kinerja

Tabel 2. 15 Indikator Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B
		Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan anggaran kas	96
2	Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Persentase Jalan Mantap	71
3	Meningkatnya sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintah	8
		Persentase cakupan air minum	72
		Persentase cakupan sanitasi	73
4	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi	81

Tabel 2. 16 Pagu Anggaran per Program Tahun 2017

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.721.877.086	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.470.415.000	
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	313.729.000	
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.652.000	
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	786.299.755	
6.	Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	785.854.000	
7.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	147.936.486.696	
8.	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	33.602.461.200	
9.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.312.601.150	
10.	Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	4.917.128.000	
11.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provisnis dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	127.673.692.500	
12.	Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	802.801.850	
13.	Pengembangan Kinerja Penyelenggaraan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan	377.291.500	

No	PROGRAM	ANGGARAN	KET
	Bangunan		
14.	Perencanaan Tata Ruang	2.665.381.600	
15.	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	145.746.900	
16.	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	299.566.000	
17.	Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	221.766.000	
	JUMLAH	327.278.750.237	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat serta menjelaskan atas keberhasilan dan kegagalannya. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 12
Klasifikasi Penilaian Keberhasilan / Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis Dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2017

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	75% - 84%	Baik
3	56% - 74%	Cukup
4	< 55%	kurang

Tabel 3. 13 Capaian Target Kinerja Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya tata	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	kelola organisasi	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	96%	95,58%	99,56%
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	71%	71.05%	100,07%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	8 unit	7 unit	87.5%
		Persentase cakupan air minum	72%	75.83%	105.32%
		Persentase cakupan sanitasi	73%	75.88%	103.95%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	81%	84%	103.7%

3.1.1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Adapun nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum ada penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dari target B pada Tahun 2017.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%

3.1.2. Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan

Adapun realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
2.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	96%	95.58%	99.56%

Untuk Realisasi fisik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat dapat mencapai realisasi diatas target yaitu sebesar 98.51% dari target 96%. Sedangkan Realisasi keuangan sebesar 92.64% atau berada dibawah target 96%.

Untuk mencari gabungan realisasi antara fisik dan keuangan dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{98,51\% + 92,64\%}{2} = 95,58 \%$$

2

$$\text{Capaian target : } (95,58 : 96,00) \times 100 = 99,56 \%$$

3.1.3. Persentase Jalan Mantap

Persentase jalan mantap merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat. Dengan Panjang jalan provinsi sepanjang 1525,25 km, ditargetkan pada akhir tahun 2017 persentase kemantapan jalan provinsi dapat menjadi 71%.



Gambar 3. 9 Pembangunan Jalan Provinsi

Dengan pencapaian atas target sebesar 100,7% tersebut maka **klasifikasi penilaian untuk Persentase Jalan Mantap adalah Sangat Baik.**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
3	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	71%	71.05%	100,07%

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2017 sebesar 71,05%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi ini.

Tabel 3. 14
Program yang mendukung pencapaian Target Indikator Kinerja yang ditetapkan

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Pembangunan Jalan dan Jembatan	147.936.486.696	132.545.083.781	89,60
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	33.602.461.200	32.198.343.328	95,82
3.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.312.601.150	1.273.019.147	96,98
Jumlah		182.851.549.046	166.016.446.256	90.79

Pada tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat melakukan survey IRMS dan pembuatan peta digital dengan sumber dana APBD Provinsi Sumatera Barat dengan Perjanjian Kontrak No. 630/87/KTR-PERENC-BM/2017 TANGGAL 17 Mei 2017 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 391.633.000,- yang dikerjakan oleh PT. Garis Putih Sejajar.

Maksud dan tujuan dari Survey Pembinaan Jalan Provinsi (IRMS) meliputi beberapa kegiatan :

1. Menghimpun data base jalan melalui kegiatan survey – survey dan dilanjutkan tahapan pekerjaan screening data base hasil survey sesuai dengan kaidah IRMS yang digunakan Dirjen Bina Marga kedalam suatu file yang berisi informasi status

& fungsi, Peta Kondisi (SDI), Peta Kekasaran (IRI) serta pemograman tahunan, budjeting serta jenis penanganan jalan provinsi.

2. Melakukan pemutakhiran terhadap peta jaringan jalan provinsi Sumatera Barat digital berbasis GIS dengan skala 1 : 250.000 yang menampilkan Sumatera Barat dengan atribut status jala, kondisi jalan, data lalu lintas (LHR), jenis perkerasan dan panjang ruas.

Informasi penjelasan data sebagai berikut :

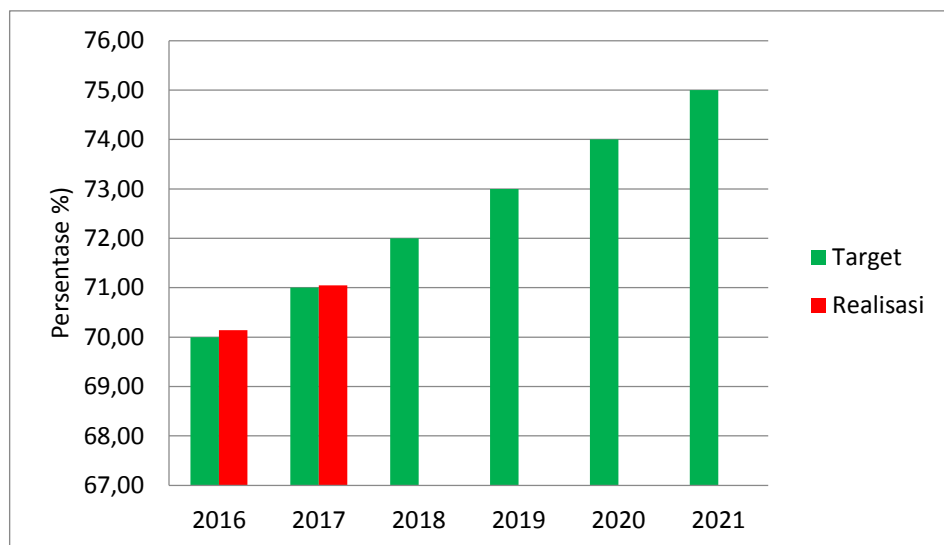
a. Dasar perhitungan kemantapan jalan

- Dasar perhitungan realisasi kemantapan jalan provinsi
Perbandingan jumlah mantap jalan provinsi dibandingkan dengan total panjang jalan provinsi (km) dikalikan 100 %.
- Dasar perhitungan realisasi kemantapan jalan nasional
Perbandingan jumlah mantap jalan provinsi dibandingkan dengan total panjang jalan provinsi (km) dikalikan 100 %.

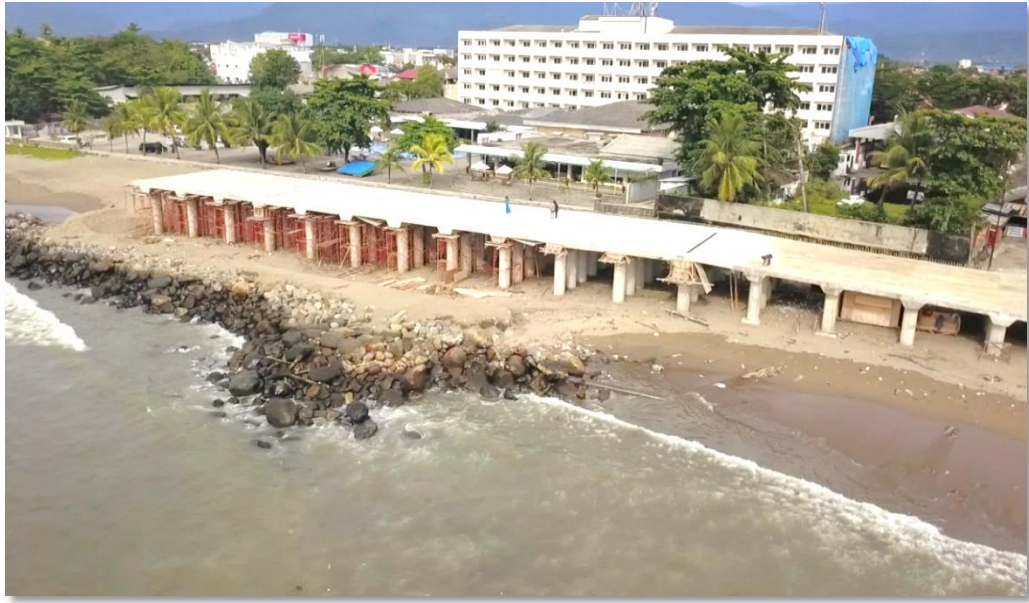
b. Sumber data

- Bidang Bina Marga (Survey IRMS / BMS) Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat.
- Satker P2JN Kementerian PUPR.

Mengacu pada target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 berikut target yang ingin dicapai dalam indikator Jalan Mantap.



Gambar 3. 10
Target dan Realisasi Per Tahun Jalan Mantap Menurut Renstra Tahun 2016-2021



Gambar 3. 11 Jembatan Lolong

Adapun panjang jalan provinsi Mantap mengalami peningkatan sepanjang 33.61 km pada Tahun 2016 sebagaimana tertulis pada Tabel 3.4.

Tabel 3. 15 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Barat (Status Desember 2017)

KONDISI	TAHUN					
	2015		2016		2017	
	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'
Mantap	1121,41	91.13	1050.04	70.14	1083.65	71.05
Tidak Mantap	109.21	8.67	475.16	29.86	441.55	28.95
Panjang Total	1230,62	100	1525.20	100	1525.2	100

KONDISI KEMANTAPAN RUAS JALAN PROVINSI TAHUN 2017
REKAPITULASI KONDISI KEMANTAPAN JALAN STATUS TAHUN 2017
KONDISI UMUM KEMANTAPAN JALAN BERDASARKAN NILAI IRI

Kondisi Perkerasan Badan Jalan

Aspal	Tefloid / Kerikil	Tanah	Beton	Panjang Total
1093.662	4.530	411.463	15.545	1525.200

Dengan Detail Data Kondisi Perkerasan Badan Jalan sebagai berikut :

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
			ASPAL	TEFLOID/ KERIKIL	TANAH	BETON	
1	06.007	Simancung - Tanjung Ampalu	11.08	0.00	0.00	0.00	11.080
2	06.008	Tanjung Ampalu - Sijunjung	20.00	0.00	0.00	0.00	20.000
3	06.010	Simp.Sikabau - Simp.Koto Baru	29.00	0.00	0.00	0.00	29.000
4	06.011	Simp.Koto Baru - Tanjung Simalidu	11.90	0.00	0.00	0.00	11.900
5	06.012	Simp.Koto Baru - Junction	5.40	0.00	0.00	0.00	5.400
6	06.018	Indrapura - Muara Sakai	7.30	0.00	0.00	0.00	7.300
7	06.025	Manggopoh - Padang Luar	69.43	0.00	0.00	0.00	69.430
8	06.028	Sicincin - Kuraitaji	16.44	0.00	0.00	0.00	16.440
9	06.031	Panti - Simpang Empat	74.23	0.00	0.00	0.00	74.230
10	06.033	Simp. Empat - Sasak	20.00	0.00	0.00	0.00	20.000
11	06.034.2	Air Balam - Air Bangis	12.60	0.00	0.00	0.00	12.600
12	06.035	Kubu Kerambil - Batusangkar	18.50	0.00	0.00	0.00	18.500
13	06.036	Baso - Bts Batusangkar (Balai Selasa)	28.79	0.00	0.00	0.00	28.790
14	06.037	Bts Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	10.40	0.00	0.00	0.00	10.400
15	06.038.2	Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30.60	0.00	0.00	0.00	30.600
16	06.039	Guguk Cino - Sitangkai	15.12	0.00	0.00	0.00	15.120
17	06.040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	17.28	0.00	0.00	0.00	17.280
18	06.044	Bts Kota Payakumbuh - Sitangkai	50.61	0.00	0.00	0.00	50.610
19	06.054	Junction - Abaisiat	12.60	0.00	0.00	0.00	12.600

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
			ASPAL	TEFLOID/ KERIKIL	TANAH	BETON	
20	06.055	Sijunjung - Tanah Badantung	4.40	0.00	0.00	0.00	4.400
21	06.056.1	Simp.Padang Aro -Lubuk Malako	17.46	0.00	0.60	1.93	20.000
22	06.056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	17.00	0.00	0.00	0.00	17.000
23	06.056.3	Abai Sangir - Sei Dareh	16.96	0.00	56.59	0.44	74.000
24	06.068	Padangsawah - Kumpulan	35.500	1.00	0.00	0.00	36.500
25	06.069.2	Batas Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	46.850	0.00	0.00	0.00	46.850
26	06.070	Batusangkar - Ombilin	18.510	0.00	0.00	0.00	18.510
27	06.071	Solok- Alahan Panjang	47.800	0.00	0.00	0.000	47.800
28	06.072	Lubuk Basung - Sungai Limau	30.900	0.00	0.00	0.000	30.900
29	06.073	Pasar Baru - Alahan Panjang	25.315	0.00	24.08	0.00	49.40
30	06.075	Simp Duku (Ketaping) - Pariaman	20.020	0.00	0.48	0.00	20.50
31	06.076	Pangkalan Kt.Baru- Sialang - Gelugur	53.344	0.00	20.60	0.00	73.95
32	06.078	Simp.Koto Mambang - Balingka	39.150	0.00	0.00	0.25	39.40
33	06.079	Simp Baso - Piladang	11.140	0.00	0.00	0.00	11.14
34	06.080	Matur - Palembang	20.600	0.00	0.00	0.10	20.70
35	06.081	Palembayan - Palupuh (Simp.Patai)	13.300	0.00	0.00	0.00	13.30
36	06.082	Alahan Panjang - Kiliran Jao	18.508	0.00	53.61	0.78	72.90
37	06.083	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	3.150	0.00	38.95	2.00	44.10
38	06.084	Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	14.170	0.00	0.00	0.00	14.17
39	06.085	Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (Tpa Regional)	0.300	0.33	0.00	1.42	2.05
40	06.086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	9.700	0.00	17.36	0.64	27.70
41	06.087	Duku - Sicincin	0.300	0.00	28.35	0.00	28.65
42	06.088	Padang Koto Gadang - Palembang	31.000	0.00	0.00	0.00	31.00
43	06.089	Jl. Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok	0.000	0.00	9.70	0.00	9.70
44	06.090	Palupuah - Pua Gadih - Koto Tinggi	13.396	0.00	10.52	1.08	25.00
45	06.091	Simpang Napal - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	1.067	0.00	21.63	0.30	23.00
46	06.092	Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	28.40	0.00	0.00	0.00	28.40
47	06.093	Singkarak - Aripin - Tj. Balit - Padang Ganting	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	PERKERASAN BADAN JALAN				PANJANG (SK)
			ASPAL	TEFLOID/ KERIKIL	TANAH	BETON	
48	06.094	Pintu Angin - Lubuak Saiyo	4.03	0.00	1.46	0.00	5.50
49	06.095	Rao - Rokan (Batas Riau)	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00
50	06.096	Lubuk Sikaping - Talu	14.91	0.00	13.09	0.00	28.00
51	06.097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	1.35	2.00	39.85	0.00	43.20
52	06.098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	0.90	0.00	11.10	0.00	12.00
53	06.099	Purus - Bandara Internasional Minang Kabau	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
54	06.100	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20
55	06.101	Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	7.04	0.00	39.96	0.00	47.00
56	06.102	Rawang - Talawi	1.70	1.20	2.60	0.50	6.00
57	06.103	Simpang Sp II - Kantor Camat	0.00	0.00	1.00	4.10	5.10
58	06.104	Kantor Camat - Berkat	0.00	0.00	3.900	2.00	5.90
TOTAL			1093.7	4.530	411.46	15.55	1525.200

Kondisi Jalan Berdasarkan IRI

Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
279.58	18.33%	804.07	52.72%	75.53	4.95%	366.02	24%

Dengan detail data Kondisi Jalan Berdasarkan IRI sebagai berikut :

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%	(KM)	%
1	06.007	Simancung - Tanjung Ampalu	1,18	0,08	8,7	0,57	1,20	0,08	0,00	0,00
2	06.008	Tanjung Ampalu - Sijunjung	6,50	0,43	11,6	0,76	0,17	0,01	1,73	0,11
3	06.010	Simp.Sikabau - Simp.Koto Baru	20,94	1,37	7,3	0,48	0,00	0,00	0,76	0,05
4	06.011	Simp.Koto Baru - Tanjung Simalidu	8,01	0,53	3,13	0,21	0,43	0,03	0,33	0,02

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	%	(KM)		(KM)	%	(KM)	%
5	06.012	Simp.Koto Baru - Junction	2,08	0,14	2,25	0,15	1,05	0,07	0,02	0,00
6	06.018	Indrapura - Muara Sakai	0,20	0,01	5,13	0,34	1,37	0,09	0,60	0,04
7	06.025	Manggopoh - Padang Luar	6,47	0,42	60	3,93	2,66	0,17	0,30	0,02
8	06.028	Sicincin - Kuraitaji	7,07	0,46	7,54	0,49	1,20	0,08	0,63	0,04
9	06.031	Panti - Simpang Empat	26,62	1,75	37,97	2,49	5,97	0,39	3,67	0,24
10	06.033	Simp. Empat - Sasak	14,20	0,93	5,49	0,36	0,31	0,02	0,00	0,00
11	06.034.2	Air Balam - Air Bangis	10,70	0,70	1,8	0,12	0,10	0,01	0,00	0,00
12	06.035	Kubu Kerambil - Batusangkar	3,26	0,21	12,96	0,85	1,70	0,11	0,58	0,04
13	06.036	Baso - Bts Batusangkar (Balai Selasa)	8,15	0,53	17,42	1,14	2,52	0,17	0,70	0,05
14	06.037	Bts Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	0,20	0,01	9,6	0,63	0,60	0,04	0,00	0,00
15	06.038.2	Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	1,80	0,12	28,6	1,88	0,10	0,01	0,10	0,01
16	06.039	Guguk Cino - Sitangkai	1,40	0,09	10,95	0,72	1,77	0,12	1,00	0,07
17	06.040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	5,10	0,33	11,88	0,78	0,30	0,02	0,00	0,00
18	06.044	Bts Kota Payakumbuh - Sitangkai	16,48	1,08	33,33	2,19	0,50	0,03	0,30	0,02
19	06.054	Junction - Abaisiat	10,89	0,71	1,71	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
20	06.055	Sijunjung - Tanah Badantung	1,06	0,07	3,3	0,22	0,00	0,00	0,04	0,00
21	06.056.1	Simp.Padang Aro -Lubuk Malako	3,20	0,21	13,1	0,86	2,00	0,13	1,70	0,11
22	06.056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	0,04	0,00	16,76	1,10	0,10	0,01	0,10	0,01
23	06.056.3	Abai Sangir - Sei Dareh	0,20	0,01	42,02	2,76	0,10	0,01	31,68	2,08
24	06.068	Padangsawah - Kumpulan	3,27	0,21	28,06	1,84	4,97	0,33	0,20	0,01
25	06.069.2	Batas Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	15,16	0,99	26,6	1,74	3,99	0,26	1,10	0,07
26	06.070	Batusangkar - Ombilin	5,47	0,36	10,05	0,66	1,41	0,09	1,58	0,10
27	06.071	Solok- Alahan Panjang	6,72	0,44	27,46	1,80	6,86	0,45	6,76	0,44
28	06.072	Lubuk Basung - Sungai Limau	5,65	0,37	15,75	1,03	2,58	0,17	6,92	0,45
29	06.073	Pasar Baru - Alahan Panjang	0,49	0,03	10,24	0,67	7,61	0,50	31,06	2,04
30	06.075	Simp Duku (Ketaping) - Pariaman	11,31	0,74	3,82	0,25	1,77	0,12	3,60	0,24
31	06.076	Pangkalan Kt.Baru- Sialang - Gelugur	14,97	0,98	47,73	3,13	0,50	0,03	10,75	0,70
32	06.078	Simp.Koto Mambang - Balingka	24,36	1,60	8,88	0,58	0,46	0,03	5,70	0,37
33	06.079	Simp Baso - Piladang	0,80	0,05	6,55	0,43	2,67	0,18	1,12	0,07

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KONDISI JALAN BERDASARKAN IRI							
			BAIK		SEDANG		RUSAK RINGAN		RUSAK BERAT	
			(KM)	%	(KM)		(KM)	%	(KM)	%
34	06.080	Matur - Palembang	1,30	0,09	13	0,85	4,00	0,26	2,40	0,16
35	06.081	Palembayan - Palupuh (Simp.Patai)	0,00	0,00	10,9	0,71	0,70	0,05	1,70	0,11
36	06.082	Alahan Panjang - Kiliran Jao	0,00	0,00	23,95	1,57	0,10	0,01	48,85	3,20
37	06.083	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	0,00	0,00	3,15	0,21	0,00	0,00	40,95	2,68
38	06.084	Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	5,06	0,33	7,17	0,47	1,94	0,13	0,00	0,00
39	06.085	Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (Tpa Regional)	0,00	0,00	0,75	0,05	0,90	0,06	0,40	0,03
40	06.086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	0,00	0,00	17,9	1,17	0,00	0,00	9,80	0,64
41	06.087	Duku - Sicincin	0,00	0,00	0,3	0,02	0,00	0,00	28,35	1,86
42	06.088	Padang Koto Gadang - Palembang	5,60	0,37	20,37	1,34	1,87	0,12	3,16	0,21
43	06.089	Jl. Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	9,70	0,64
44	06.090	Palupuah - Pua Gadih - Koto Tinggi	0,60	0,04	20,1	1,32	0,00	0,00	4,30	0,28
45	06.091	Simpang Napal - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	0,70	0,05	13,55	0,89	0,00	0,00	8,75	0,57
46	06.092	Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	2,76	0,18	24,43	1,60	0,55	0,04	0,66	0,04
47	06.093	Singkarak - Aripian - Tj. Balit - Padang Ganting	3,16	0,21	21,47	1,41	2,83	0,19	2,54	0,17
48	06.094	Pintu Angin - Lubuak Saiyo	4,25	0,28	1,25	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00
49	06.095	Rao - Rokan (Batas Riau)	7,86	0,52	22,44	1,47	2,62	0,17	0,08	0,01
50	06.096	Lubuk Sikaping - Talu	4,14	0,27	9,61	0,63	0,55	0,04	13,70	0,90
51	06.097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	0,20	0,01	10,17	0,67	1,63	0,11	31,20	2,05
52	06.098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	0,00	0,00	0,9	0,06	0,00	0,00	11,10	0,73
53	06.099	Purus - Bandara Internasional Minang Kabau	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	16,00	1,05
54	06.100	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	0,00	0,00	0,39	0,03	0,41	0,03	0,40	0,03
55	06.101	Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	0,00	0,00	32,99	2,16	0,06	0,00	13,95	0,91
56	06.102	Rawang - Talawi	0,00	0,00	5,5	0,36	0,40	0,03	0,10	0,01
57	06.103	Simpang Sp II - Kantor Camat	0,00	0,00	4,1	0,27	0,00	0,00	1,00	0,07
58	06.104	Kantor Camat - Berkat	0,00	0,00	2	0,13	0,00	0,00	3,90	0,26
TOTAL			279.58	18.33	804.07	52.72	75.53	4.95	366.02	24

Kemantapan Jalan

Mantap		Tidak Mantap	
Km	%	Km	%
1083.650	71.05	441.550	28.95

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KEMANTAPAN JALAN			
			MANTAP		TIDAK MANTAP	
			(KM)	%	(KM)	%
1	06.007	Simancung - Tanjung Ampalu	9,88	89,17	1,20	10,83
2	06.008	Tanjung Ampalu - Sijunjung	18,10	90,50	1,90	9,51
3	06.010	Simp.Sikabau - Simp.Koto Baru	28,24	97,38	0,76	2,63
4	06.011	Simp.Koto Baru - Tanjung Simalidu	11,14	93,61	0,76	6,39
5	06.012	Simp.Koto Baru - Junction	4,33	80,19	1,07	19,89
6	06.018	Indrapura - Muara Sakai	5,33	73,01	1,97	26,99
7	06.025	Manggopoh - Padang Luar	66,47	95,74	2,96	4,26
8	06.028	Sicincin - Kuraitaji	14,61	88,87	1,83	11,11
9	06.031	Panti - Simpang Empat	64,59	87,01	9,64	12,99
10	06.033	Simp. Empat - Sasak	19,69	98,45	0,31	1,55
11	06.034.2	Air Balam - Air Bangis	12,50	99,21	0,10	0,79
12	06.035	Kubu Kerambil - Batusangkar	16,22	87,68	2,28	12,32
13	06.036	Baso - Bts Batusangkar (Balai Selasa)	25,57	88,82	3,22	11,18
14	06.037	Bts Batusangkar (Bukit Gombak) - Guguk Cino	9,80	94,23	0,60	5,77
15	06.038.2	Guguk Cino - Sawahlunto (Lapangan Segitiga)	30,40	99,35	0,20	0,65
16	06.039	Guguk Cino - Sitangkai	12,35	81,68	2,77	18,32
17	06.040	Sitangkai - Tanjung Ampalu	16,98	98,26	0,30	1,74
18	06.044	Bts Kota Payakumbuh - Sitangkai	49,81	98,42	0,80	1,58
19	06.054	Junction - Abaisiat	12,60	100,00	0,00	0,00
20	06.055	Sijunjung - Tanah Badantung	4,36	99,09	0,04	0,86
21	06.056.1	Simp.Padang Aro -Lubuk Malako	16,30	81,50	3,70	18,51
22	06.056.2	Lubuk Malako - Abai Sangir	16,80	98,82	0,20	1,18
23	06.056.3	Abai Sangir - Sei Dareh	42,22	57,05	31,78	42,95
24	06.068	Padangsawah - Kumpulan	31,33	85,84	5,17	14,16

NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KEMANTAPAN JALAN			
			MANTAP		TIDAK MANTAP	
			(KM)	%	(KM)	%
25	06.069.2	Batas Payakumbuh - Suliki - Koto Tinggi	41,76	89,14	5,09	10,86
26	06.070	Batusangkar - Ombilin	15,52	83,85	2,99	16,16
27	06.071	Solok- Alahan Panjang	34,18	71,51	13,62	28,50
28	06.072	Lubuk Basung - Sungai Limau	21,40	69,26	9,50	30,73
29	06.073	Pasar Baru - Alahan Panjang	10,73	21,72	38,67	78,28
30	06.075	Simp Duku (Ketaping) - Pariaman	15,13	73,80	5,37	26,20
31	06.076	Pangkalan Kt.Baru- Sialang - Gelugur	62,70	84,79	11,25	15,21
32	06.078	Simp.Koto Mambang - Balingka	33,24	84,37	6,16	15,63
33	06.079	Simp Baso - Piladang	7,35	66,00	3,79	34,01
34	06.080	Matur - Palembang	14,30	69,08	6,40	30,92
35	06.081	Palembayan - Palupuh (Simp.Patai)	10,90	81,95	2,40	18,05
36	06.082	Alahan Panjang - Kiliran Jao	23,95	32,85	48,95	67,15
37	06.083	Teluk Kabung - Mandeh - Tarusan	3,15	7,14	40,95	92,86
38	06.084	Jl. Lingkar Selatan (Payakumbuh)	12,23	86,31	1,94	13,69
39	06.085	Simpang Padang Karambia - Tj. Bungo (Tpa Regional)	0,75	36,59	1,30	63,41
40	06.086	Surantiah - Kayu Aro - Langgai	17,90	64,62	9,80	35,38
41	06.087	Duku - Sicincin	0,30	1,05	28,35	98,95
42	06.088	Padang Koto Gadang - Palembang	25,97	83,77	5,03	16,22
43	06.089	Jl. Balingka - Terowongan - Ngarai Sianok	0,00	0,00	9,70	100,00
44	06.090	Palupuah - Pua Gadih - Koto Tinggi	20,70	82,80	4,30	17,20
45	06.091	Simpang Napal - Bukit Bual - Tanjung Ampalu	14,25	61,96	8,75	38,04
46	06.092	Sp. Ganting Payo - Batas Tanah Datar - Sumani	27,19	95,74	1,21	4,26
47	06.093	Singkarak - Arian - Tj. Balit - Padang Ganting	24,63	82,10	5,37	17,90
48	06.094	Pintu Angin - Lubuak Saiyo	5,50	100,00	0,00	0,00
49	06.095	Rao - Rokan (Batas Riau)	30,30	91,82	2,70	8,17
50	06.096	Lubuk Sikaping - Talu	13,75	49,11	14,25	50,89
51	06.097	Bungo Tanjung - Teluk Tapang	10,37	24,00	32,83	76,00
52	06.098	Teluk Bayur - Nipah - Purus	0,90	7,50	11,10	92,50
53	06.099	Purus - Bandara Internasional Minang Kabau	0,00	0,00	16,00	100,00
54	06.100	Batu Batembak - Pelabuhan Panasahan	0,39	32,50	0,81	67,50

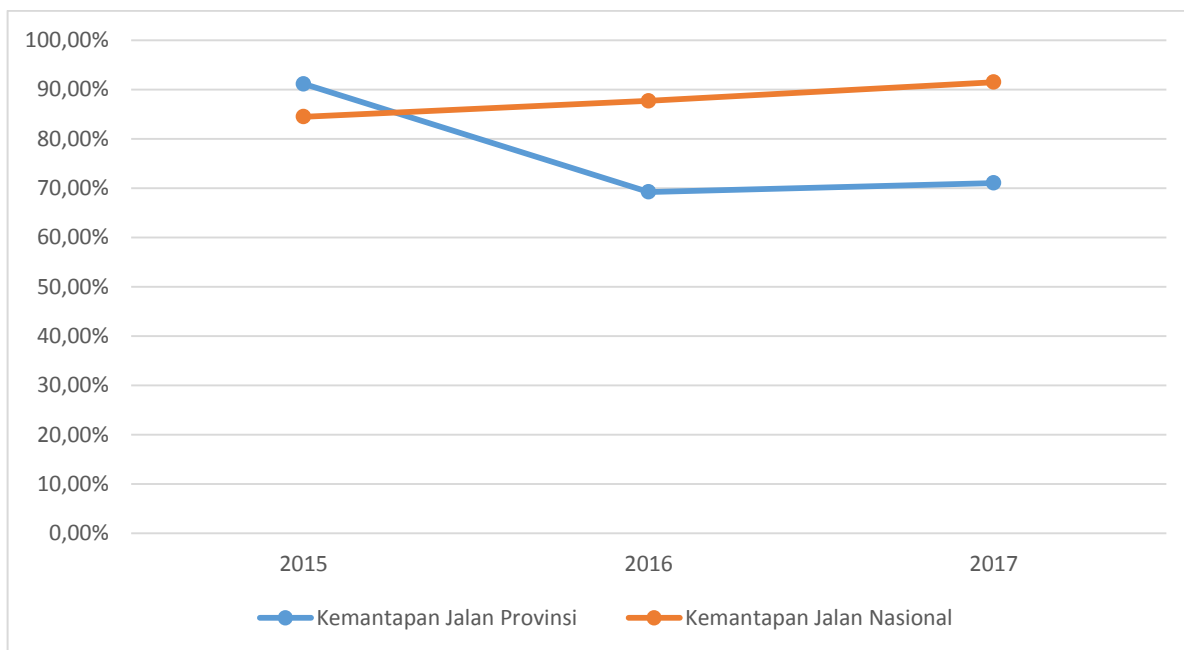
NO	NO RUAS	NAMA RUAS	KEMANTAPAN JALAN			
			MANTAP		TIDAK MANTAP	
			(KM)	%	(KM)	%
55	06.101	Tapus - Muaro Sei. Lolo - Gelugur	32,99	70,19	14,01	29,81
56	06.102	Rawang - Talawi	5,50	91,67	0,50	8,33
57	06.103	Simpang Sp II - Kantor Camat	4,10	80,39	1,00	19,61
58	06.104	Kantor Camat - Berkat	2,00	33,90	3,90	66,10
TOTAL			1083.65	71.05	441.55	28.95

Dibandingkan dengan kondisi jalan nasional kondisi kemantapan jalan provinsi Pada Tahun 2017 berada dibawah kondisi kemantapan jalan nasional. Adapun kondisi kemantapan jalan nasional dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3. 16 Kondisi Kemantapan Jalan Nasional

KONDISI	TAHUN					
	2015		2016		2017	
	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(%)	(KM) / M'	(KM) / M'
Mantap	1224.09	84.49	1270.60	87.70	1325.34	91.48
Tidak Mantap	224.72	15.51	178.21	12.30	123.47	8.52
Panjang Total	1448.81	100	1448.81	100	1448.81	100

Berikut diagram yang menunjukkan perbandingan antara kemantapan jalan nasional dengan kemantapan jalan provinsi Sumatera Barat Pada Tahun 2015 – 2017.



Gambar 3. 12
Perbandingan Kemantapan Jalan Nasional dengan Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2015 - 2017

3.1.4. Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

Sesuai dengan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Tahun 2017 ditargetkan telah tersedianya sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan sebanyak 8 unit. Sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang dimaksud terbagi atas Bangunan Strategis, Gedung Negara, Rumah Negara dan Shelter.

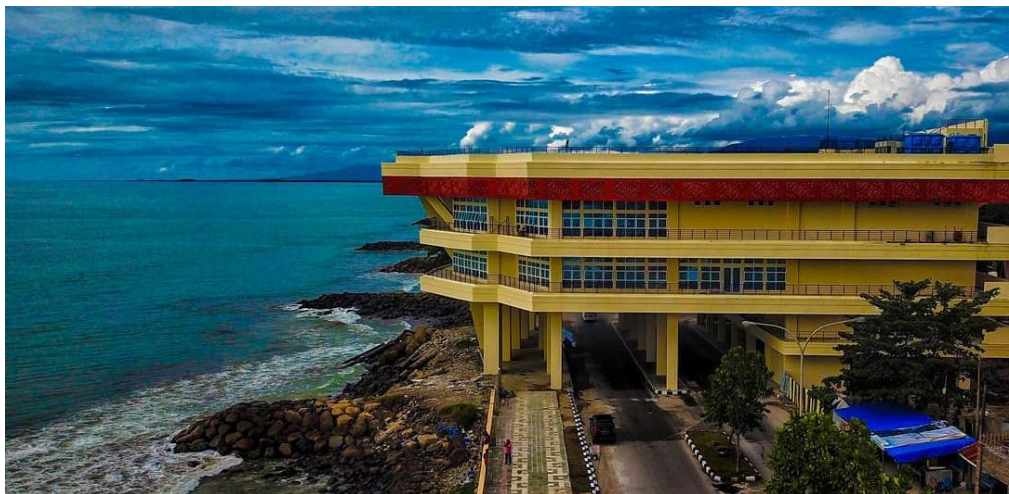
Adapun indikator Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan didefinisikan sebagai **sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang telah selesai dibangun dan siap ditempati pada Tahun 2017**. Sedangkan bangunan yang masih sedang dalam proses pembangunan tidak dihitung sebagai indikator pada sasaran ini.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
4	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	8 unit	7 unit	87.5%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
	pelayanan dasar masyarakat				

Adapun 8 unit sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang ditargetkan selesai pada Akhir 2017 adalah :

1. Pembangunan Prasasti APDN Lama
2. Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat
3. Pembangunan Gedung DPKD
4. Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan
5. Pembangunan Gedung UPTD Balai Koperasi Provinsi Sumatera Barat
6. Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan
7. Pembangunan Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat
8. Pembangunan Kembali Rumah Dinas TNI AD (Kodim 0304/Agam)



Gambar 3. 13 Gedung Kebudayaan sebagai Salah Satu Gedung Strategis

Berdasarkan target tersebut, dalam pembangunan sarana dan prasarana penunjang tata pemerintah tersebut ada 1 (satu) gedung yang tidak dapat diselesaikan pada Tahun 2017 yaitu Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini disebabkan karena pada Kegiatan Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan belum selesai dan pihak ketiga (pelaksana) dikenakan denda, namun pembangunan gedung lain yang sedang dalam tahap pengerjaan masih berlangsung sesuai target. Dengan capaian 7 unit dari 8 unit target tersebut capaian indikator **Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan sebesar 87.5% atau dapat diklasifikasikan dengan sangat baik.**

Berikut daftar sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan yang sedang dalam proses pembangunan maupun yang telah selesai dibangun pada Tahun Anggaran 2017.

Tabel 3. 17 sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

No	Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan		Realisasi Fisik Tahun 2017	Realisasi Fisik terhadap Keseluruhan Bangunan		Ket
				Target Kumulatif Hingga 2017	Realisasi Kumulatif Hingga 2017	
1	Bangunan Strategis Provinsi	Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat	100%	6.1%	6.1%	
		Pembangunan Gedung Kebudayaan Sumatera Barat	100%	22.8%	22.8%	
		Pembangunan Gedung Convention Hall Sumatera Barat	100%	56.5%	56.5%	
		Pembangunan Gedung Bundo Kandung Provinsi Sumatera Barat	100%	34.52%	34.52%	
		Pembangunan Prasasti APDN Lama	100%	100%	100%	
2	Bangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan Gedung ESDM Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung	100%	60%	60%	

No	Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan		Realisasi Fisik Tahun 2017	Realisasi Fisik terhadap Keseluruhan Bangunan		Ket
				Target Kumulatif Hingga 2017	Realisasi Kumulatif Hingga 2017	
		Pemberdayaan Wanita dan KB Provinsi Sumatera Barat				
		Pembangunan Gedung DPKD	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung Badan Ketahanan Pangan	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung UPTD Balai Koperasi Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%	
		Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan	100%	100%	95%	
		Pembangunan Gedung Pengendali Inflasi Sumatera Barat	100%	85.07%	85.07%	
3	Bangunan Rumah Negara	Pembangunan Rumah Dinas Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat	100%	100%	100%	
		Pembangunan Kembali Rumah Dinas TNI AD (Kodim 0304/Agam)	100%	100%	100%	
4	Tempat Evakuasi Sementara/ Shelter	Pembangunan Shelter Di Mushalla Jabal Rahmah di Painan	100%	30%	30%	
		Penyempurnaan Shelter Evakuasi Tsunami SMA 1 Sutra Kab. Pesisir Selatan	100%			

3.1.5. Persentase cakupan air minum

Cakupan air minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target *Universal Access* Nasional, namun pada Tahun 2017 ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menargetkan capaian sebesar 72% untuk cakupan air minum Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3. 18 Target dan Capaian Indikator Persentase Air Minum di Sumatera Barat Tahun 2017

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
5	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum	72%	75.83%	105.32%

Berdasarkan data tersebut dapat dilihat capaian persentase cakupan air minum pada Tahun 2017 adalah sebesar 75.83% atau sebesar 105.32% atas taret yang telah ditetapkan. Adapun **klasifikasi capaian ini adalah sangat baik**. Capaian cakupan air minum ini dicapai melalui Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan dua kegiatan dan Total Anggaran Rp 4.917.128.000,- . Berikut kegiatan dan realisasi kegiatan terkait dengan capaian indikator ini.

Tabel 3. 8 Program dan Kegiatan Pendukung Persentase Cakupan Air Minum Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kegiatan	Anggaran (Rp Juta)	Target	Lokasi	Realisasi Anggaran (Rp)
	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	4.917.128.000			4.154.549.511
1	Penyusunan DED dan AMDAL SPAM Regional Prov. Sumatera Barat	98.530.000	1 kws	Kab. Agam – Kota Bukittinggi	91.994.450
2	Peningkatan Kinerja Pelayanan Air Minum (SPAM) di Provinsi Sumatera Barat Wilayah I	4.268.598.000	1 kws (5.790 m)	Ujung Gading Kab. Pasaman Barat	3.654.411.604

Adapun data lengkap cakupan air minum per kabupaten/kota dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 3. 9
Data Cakupan Air Minum Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017

No	Kabupaten / Kota	Persentase Capaian Air Minum
1	Bukittinggi	51.85
2	Padang	60.92
3	Payakumbuh	100.00
4	Sawahlunto	76.52
5	Kab. Dharmasraya	65.58
6	Pariaman	87.42
7	Kab. Agam	78.35
8	Padang Panjang	87.66
9	Solok	87.36
10	Kab. Tanah Datar	77.09
11	Kab. Pesisir Selatan	81.68
12	Kab. Sijunjung	91.30
13	Kab. Pasaman Barat	80.47
14	Kab. Padang Pariaman	84.70
15	Kab. 50 Kota	73.89
16	Kab. Solok	84.81
17	Kab. Pasaman	76.35
18	Kab. Solok Selatan	86.33
19	Kep. Mentawai	24.59
TOTAL		75.83

Tabel 3. 10
Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Persentase Cakupan Air Minum	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
2016	72.32%	71.50%
2017	75.83%	72.04%
Target 2018	75%	92.2%
Target 2019	80%	100%
Target 2020	83%	-
Target 2021	86%	-

Sumber : RPJMN 2015-2019 (diolah)

3.1.6. Persentase cakupan sanitasi

Sebagaimana air minum, sanitasi merupakan salah satu indikator yang termuat dalam Universal Access dengan capaian Nasional Pada 2019 sebesar 100%. Pada Tahun 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat menargetkan capaian Sanitasi sebesar 73% dengan realisasi capaian sebesar 75.88%.

Tabel 3. 11 Indikator Cakupan Sanitasi

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan sanitasi	73%	75.88%	103.95%

Dengan realisasi tersebut, maka persentase capaian Indikator Persentase Cakupan Sanitasi pada Tahun 2017 sebesar 103.95% dan dapat diklasifikasikan dengan **sangat baik**.

Tabel 3. 12
Perbandingan antara Realisasi Kinerja
serta Capaian Kinerja dengan Standar Nasional

Persentase Sanitasi	Provinsi Sumatera Barat	Nasional
2016	-	-
2017	75.88%	71.44%
Target 2018	75%	90%
Target 2019	78%	100%
Target 2020	79%	-
Target 2021	80%	-

Sumber : RPJMN 2015-2019 (diolah)

- 3.1.7. **Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi**
 Untuk mendukung sasaran *Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung* melalui indikator *Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan Program RTRW* didukung oleh 2 (dua) program, yaitu:

Tabel 3. 13
Tabel Anggaran dan Realisasi Keuangan Program di Bidang Penataan Ruang

Program	Anggaran	Realisasi	Persentase Realisasi Keuangan
Program Perencanaan Penataan Ruang	2.665.381.600	2.442.375.041	91.63%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	145.746.900	112.709.383	77.33%

Dengan target indikator sebesar 81% capaian indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

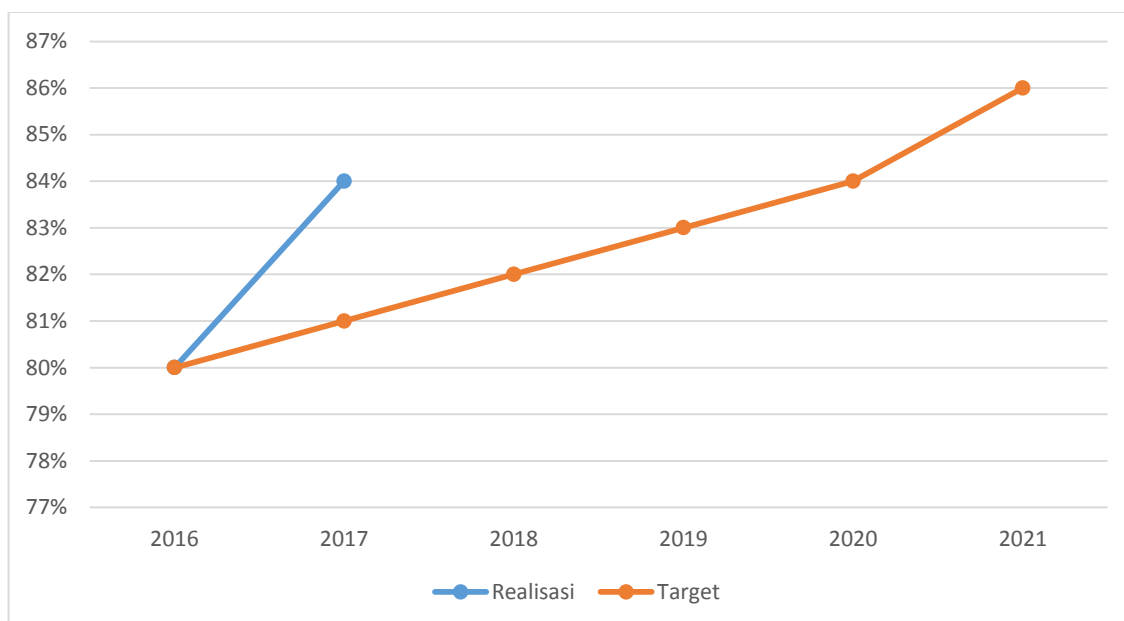
Tabel 3.14
Capaian Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Persentase Capaian
7	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	81%	84%	103.70%

Untuk mendapatkan angka ini dilakukan penghitungan dengan perbandingan Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat dengan program RTRW Provinsi Sumatera Barat dikalikan 100%. Dengan target 81%, pada Tahun 2017 tercapai 84% atau angka capaian sebesar 103.70%. Klasifikasi capaian ini dapat dikategorikan dengan **sangat baik**.

Tahun	Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang
2016	80%
2017	84%
Target 2018	82%
Target 2019	83%
Target 2020	84%
Target 2021	86%

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara target dan capaian persentase kesesuaian rencana pembangunan (RPJM) dengan rencana tata ruang (RTRW) pada Tahun 2017. Secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 3. 14
Digaram Target dan Capaian Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang Tahun 2016 - 2021

Adapun data pendukung kesesuaian program pada rencana pembangunan (RPJMD) dengan program pada Rencana Tata Ruang secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 15 Kesesuaian Program RTRW Provinsi dengan Rencana Pembangunan

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2017	OPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET		REALISASI
	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032			JUMLAH PROGRAM RTRW	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW	
<i>I</i>	<i>Program Perwujudan Pengembangan Struktur Ruang</i>			25	21	84%
<i>A</i>	<i>Program Perwujudan Pusat Kegiatan di Provinsi Sumatera Barat</i>					
1	Pemantapan Fungsi Kota PKN	Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut	Dinas Perhubungan			
2	Pemantapan Fungsi Kota PKW	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
3	Pengembangan dan Penataan PKN	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
4	Pengembangan PKW dan PKWp	Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD	Dinas Kesehatan			
5	Pengembangan PKL	Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
6	Penyusunan Renstra					
<i>B</i>	<i>Program Perwujudan Sistem Prasarana</i>					
1	Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi	Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air			

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2017	OPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET		REALISASI
	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032			JUMLAH PROGRAM RTRW	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW	
3	Prasarana Perumahan dan Permukiman	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
II	<i>Program Perwujudan Pola Ruang</i>					
A	<i>Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung</i>					
1	Pengembangan Kawasan Hutan	Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	Dinas Kehutanan			
2	Pemantapan Kawasan Lindung	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Dinas Kehutanan			
3	Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan Kawasan Lindung					
4	Kawasan Rawan Bencana Alam	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan	BPBD			
B	<i>Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya</i>					
1	Pengembangan kawasan permukiman					
	- pengembangan kawasan permukiman perdesaan					
	- pengembangan kawasan permukiman perkotaan	Pengembangan perumahan	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan			
2	Pengembangan Kawasan Pertanian	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian	Dinas Pertanian			
3	Pengembangan Perkebunan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan	Dinas Perkebunan			

NO	INDIKATOR KINERJA		OPD PENANGGUNG JAWAB	TARGET		REALISASI
	PROGRAM RTRW PROVINSI 2012-2032	PROGRAM RENCANA PEMBANGUNAN (RPJM) 2017		JUMLAH PROGRAM RTRW	JUMLAH PROGRAM RPJM YANG SESUAI DENGAN RTRW	
4	Pengembangan Kawasan Peternakan	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan	Dinas Peternakan			
5	Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan	Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan			
6	Program Pengembangan Kawasan Pertambangan	Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas ESDM			
7	Program Pengembangan Industri	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan			
8	Program Pengembangan Pariwisata	Program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata	Dinas Pariwisata			
9	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Peruntukan Lainnya					
10	Penyusunan SPM					
C	<i>Program Perwujudan Kawasan Strategis</i>					
1	Penyusunan RTR Kawasan Strategis	Perencanaan penataan ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
2	Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			

Kesesuaian program rencana pembangunan dengan program rencana tata ruang (RTRW Provinsi Sumatera Barat), dapat dilihat dari implementasi program kegiatan pemanfaatan ruang yang merupakan penjabaran dari rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang menjadi dasar/ acuan dalam program pembangunan.

Dari target yang ditetapkan sebesar 81 %, ternyata realisasi yang telah dicapai sebesar 84 %, artinya jumlah program pembangunan yang disusun pada RPJM sebagian besar telah sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dan indikasi program pada RTRW.

Adapun tingkat kesesuaian program dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program pemantapan fungsi kota PKN yang dimaksud dalam RTRW adalah dalam rangka perwujudan pengembangan pusat kegiatan di Provinsi Sumatera Barat yakni untuk Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perlu didukung oleh ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana yang sesuai dengan skala pelayanannya. Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya pelabuhan laut internasional. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut pada Dinas Perhubungan selaku OPD penanggung jawab.
2. Program pemantapan fungsi kota PKW, sama halnya dengan PKN, maka untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya yaitu peningkatan kapasitas pelayanan air minum. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
3. Program pengembangan dan penataan PKN, Sarana dan prasarana minimum yang harus dimiliki PKN adalah salah satunya terminal regional tipe A. Hal ini telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui program Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.

4. Program Pengembangan PKW dan PKWp, untuk Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) di Provinsi Sumatera Barat, sarana prasarana minimum yang harus dimiliki salah satunya peningkatan pelayanan rumah sakit dan telah diakomodir dalam program pembangunan jangka menengah (RPJM) melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD pada Dinas Kesehatan selaku OPD penanggung jawab.
5. Program Pengembangan PKL, untuk Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) sarana prasarana minimum yang harus dimiliki tidak jauh berbeda dengan PKW yakni salah satunya peningkatan kapasitas pelayanan air minum dan telah diakomodir dalam program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan Pengembangan SPAM lintas daerah kab/kota pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
6. Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi pada RTRW untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat pelayanan infrastruktur transportasi guna mendukung tumbuhnya pusat-pusat pertumbuhan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.
7. Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi dalam RTRW untuk mewujudkan keseimbangan ketersediaan air dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan dan mempertahankan jaringan irigasi yang ada. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada Dinas Pengelolaan Sumberdaya Air selaku OPD penanggung jawab.
8. Program Prasarana Perumahan dan Permukiman pada RTRW adalah rehabilitasi dan peningkatan pelayanan Instalasi Pengolahan Limbah dan telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD penanggung jawab.

9. Program Pengembangan Kawasan Hutan dalam RTRW berupa pengembangan hutan tanaman, pengembangan ekowisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Hutan pada Dinas Kehutanan selaku OPD penanggung jawab.
10. Program Pemantapan Kawasan Lindung dalam RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatkan fungsi lindung. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam pada Dinas Kehutanan.
11. Program Kawasan Rawan Bencana Alam dalam RTRW salah satunya berupa upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan pada BPBD.
12. Program pengembangan kawasan permukiman perkotaan dalam RTRW berupa percepatan penyediaan perumahan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
13. Program Pengembangan Kawasan Pertanian pada RTRW berupa perluasan lahan dan peningkatan produktifitas lahan padi sawah. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Pertanian pada Dinas Pertanian.
14. Program Pengembangan Perkebunan pada RTRW berupa pengembangan kawasan tanaman tahunan/perkebunan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Perkebunan pada Dinas Perkebunan.
15. Program Pengembangan Kawasan Peternakan pada RTRW berupa pengembangan kawasan agribisnis peternakan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi dan Agribisnis Peternakan pada Dinas Peternakan.
16. Program Pengembangan Perikanan dan Kelautan pada RTRW salah satunya berupa rehabilitasi dan konservasi sumberdaya pesisir dan laut. Hal ini telah sesuai

dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

17. Program Pengembangan Kawasan Pertambangan dalam RTRW salah satunya berupa inventarisasi daerah yang berpotensi untuk usaha pertambangan. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas ESDM.
18. Program Pengembangan Industri dalam RTRW salah satunya berupa program pengembangan industri untuk kabupaten dan kota. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
19. Program Pengembangan Pariwisata dalam RTRW yaitu pengembangan kepariwisataan pada kawasan unggulan wisata maupun kawasan potensial wisata. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program pengembangan destinasi dan daya tarik pariwisata pada Dinas Pariwisata.
20. Program Penyusunan RTR Kawasan Strategis merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Perencanaan penataan ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
21. Program Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis, merupakan program perwujudan kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW. Hal ini telah sesuai dengan program pembangunan (RPJM) melalui program Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.2. Capaian Kinerja Bidang / UPT

Untuk mendukung capaian kinerja organisasi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didukung oleh 1 Sekretariat, 3 Bidang dan 2 UPT yang masing-masing memiliki target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian target dalam perjanjian kinerja masing-masing Bidang dan Kasi dijelaskan berikut.

3.2.1 Capaian Kinerja Bidang Bina Marga

Berdasarkan Pergub Sumatera Barat No 53 Tahun 2017, Bidang Bina Marga mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Teknis dan Leger Jalan, Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Hal ini sejalan dengan *outcome* dalam Pohon Kinerja dimana Bidang Bina Marga merupakan bidang yang bertanggungjawab terhadap peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah di Sumatera Barat.

Berdasarkan perjanjian kinerja Tahun 2017, setidaknya Bidang Bina Marga memiliki 3 sasaran untuk mewujudkan Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah tersebut, yaitu sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 16

Capaian Indikator Kinerja Bidang Bina Marga

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Berkurangnya jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir	Persentase jalan yang belum terhubung	95,34%	96.74%	98.55%
2	Meningkatnya prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan	Jumlah kendaraan yang melintas (LHR)	152 smp/jam	152 smp/jam	100%
3	Meningkatnya kualitas dan kapasitas jalan	Panjang jalan terbangun sesuai spesifikasi	3,47 km	3.75 km	108.07%
		Panjang jalan terbangun sesuai standar jalan provinsi	6,61 km	6.99 km	105.75%
		Jumlah kendaraan yang melintas (LHR)	180 smp/jam	180 smp/jam	100%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa keseluruhan capaian target dapat diklasifikasikan dengan **sangat baik**. Adapun indikator Persentase jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir disebabkan terbatasnya anggaran serta prioritas penanganan jalan pada ruas yang lebih mendesak.

3.2.2 Capaian Kinerja Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas, Penyehatan Lingkungan serta Air Minum dan Limbah.

Tabel 3. 1719 Capaian Indikator Kinerja Bidang Cipta Karya

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya penyediaan bangunan gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis lainnya yang aman dan nyaman	Jumlah gedung pemerintah, rumah negara dan bangunan strategis terbangun sesuai standar bangunan gedung negara	8 unit	7 unit	87.5%
2	Meningkatnya penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Jumlah Debit air terpasang	200 liter/detik	200 liter/detik	100%
		Persentase rumah yang bersanitasi	73%	75.88%	103.95%

Adapun rincian data debit air dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Sasaran	Indikator Kinerja	Lokasi	Debit Air
Meningkatnya penyediaan layanan air minum dan sanitasi	Jumlah debit air terpasang	Peningkatan SPAM Kawasan Sungai Rumbai	20 liter/detik
		Peningkatan SPAM Kawasan Kotobaru	20 liter/detik
		Peningkatan SPAM Kawasan Tanah Datar	20 liter/detik
		Peningkatan SPAM di Malampah	20 liter/detik
		Peningkatan SPAM di Payakumbuh	100 liter/detik

Sasaran	Indikator Kinerja	Lokasi	Debit Air
		Peningkatan SPAM di Ujung Gading	20 liter/detik

3.2.3 Capaian Kinerja Bidang Penataan Ruang

Dalam Cascading yang telah disusun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017, Bidang Penataan Ruang bertanggungjawab atas Meningkatnya Pelaksanaan Tata Ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Hal ini sekaligus menunjang capaian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dalam Tujuan 2 Misi 5. Sedangkan dalam Pergub Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2017, dijelaskan bahwa Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Perencanaan Penataan Ruang, Pembinaan Penataan Ruang Pengawasan Penataan Ruang.

Tabel 3. 208 Capaian Indikator Kinerja Bidang Penataan Ruang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Meningkatnya RTR yang berkekuatan hukum	Jumlah RTR yang diperdakan	-		
2	Meningkatnya pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR	Jumlah program yang sesuai dengan rencana tata ruang	25	25	100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi capaian kinerja Bidang Penataan Ruang Tahun 2017 adalah 100% dan dalam klasifikasi **sangat baik**. Adapun rincian realisasi pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR adalah sebagai berikut.

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi :

- Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (Pembangunan dan Peningkatan jaringan jalan arteri primer dan kolektor primer):
 1. Pembangunan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).
 2. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan provinsi (RPJM).

- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (penyediaan prasarana dan sarana air bersih) :
 3. Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/ kota
- Program perwujudan kawasan strategis :
 4. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis daerah provinsi dan lintas daerah Kabupaten/kota
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan TPA Regional, pembangunan TPA pada kabupaten/kota)
 5. Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Perumahan dan Permukiman (pembangunan IPAL, penataan bangunan dan system drainase) :
 6. Pengelolaan sistem drainase kewenangan provinsi
 7. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Sumberdaya Air dan Irigasi (peningkatan pengairan irigasi teknis, pengembangan dan konservasi area rawa, pengembangan penyediaan air baku, penanganan abrasi pantai) :
 8. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
 9. Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya
 10. Penyediaan dan pengolahan air baku
 11. Pengendalian banjir dan pengamanan pantai
- Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : Pengembangan kawasan permukiman perkotaan (percepatan penyediaan perumahan, penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh) :
 12. Pengembangan perumahan
 13. Pemberdayaan komunitas perumahan
- Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung : Program Kawasan Rawan Bencana Alam (inventarisir kaw. Rawan bencana, perda zonasi pembangunan di kaw. Rawan bencana, pembangunan system peringatan dini tsunami dll) :
 14. Peningkatan Mitigasi Bencana
 15. Peningkatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana
 16. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan
 17. Penanganan Tanggap Darurat Bencana
 18. Pemulihan Daerah Pasca Bencana
- Program Perwujudan Pengelolaan Kawasan Lindung (rehabilitasi dan konservasi kaw.lindung) :

19. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
 20. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
 21. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
- Program Perwujudan Sistem Prasarana Transportasi (pembangunan terminal, jalur KA, pengembangan transportasi laut) :
 22. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut
 23. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
 - Program Perwujudan Pemantapan Kawasan Budidaya : program pengembangan perikanan dan kelautan (pengembangan industry maritim, pengembangan sentra budidaya perikanan, dll) :
 24. Pengembangan Ekonomi Maritim
 25. Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan

3.2.4 Capaian Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan

Untuk mencapai peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan berperan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan. UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan memiliki sasaran yaitu *tersedianya peralatan labor, pengujian mutu konstruksi dan lingkungan* dengan 3 (tiga) indikator sebagai berikut :

Tabel 3. 19
Capaian Indikator Kinerja UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Tersedianya peralatan labor, pengujian mutu konstruksi dan lingkungan	Jumlah peralatan labor dan pengujian	201 unit	244 unit	121.39%
		Jumlah laporan hasil pengujian mutu konstruksi	350 dokumen	983 dokumen	281%
		Jumlah laporan hasil pengujian mutu lingkungan	35 dokumen	33 dokumen	94%

3.2.5 Capaian Kinerja UPTD PIP2B

Dalam perjanjian kinerja UPTD PIP2B dengan Kepala Dinas, UPTD PIP2B memiliki sasaran pemeriksaan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1	Pemeriksaan laik fungsi oleh tim ahli bangunan gedung (TABG)	Jumlah gedung yang laik fungsi	1 unit	1 unit	100%

3.3. Perbandingan Kinerja Organisasi

3.3.1. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu

Tabel 3. 20
Perbanding Kinerja Organisasi Tahun Lalu

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2017	Tahun 2016	Peningkatan
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	100,07%	100,35%	99,72%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	87,50 %	20 %	437,5 %
		Persentase cakupan air minum	75.83%	72.32%	104,85%
		Persentase cakupan sanitasi	75.88%	66.85%	113,50%
2	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	84%	80%	105%

3.3.2. Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra

Tabel 3. 2121
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Renstra

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2017	Target 2021	Persentase Capaian
1	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	71.05%	75%	95%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	7 unit (24 unit kumulatif)	54 unit	44%
		Persentase cakupan air minum	75.83%	74%	102%
		Persentase cakupan sanitasi	75.88%	77%	99%
2	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	84%	86%	98%

3.3.3. Perbandingan Kinerja Terhadap Target Nasional

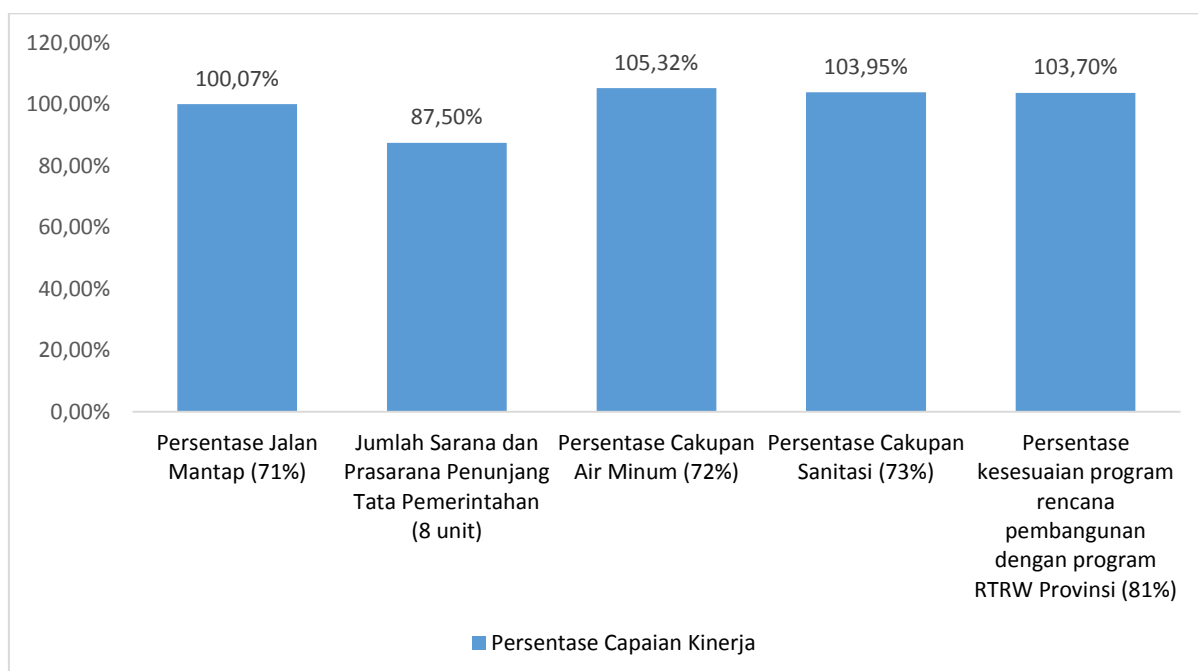
Tabel 3. 22
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Nasional

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Provinsi Sumbar	Capaian Nasional	Deviasi
2	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas wilayah	Persentase Jalan Mantap	71.05%	91.48%	-20.43%
	Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	8 unit	-	
		Persentase cakupan air minum	75.83%	72.04%	+3.79%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Provinsi Sumbar	Capaian Nasional	Deviasi
	masyarakat	Persentase cakupan sanitasi	75.88%	71.44%	+4.44%
3	Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	81%	-	

3.4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan Kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari ketujuh target kinerja yang telah ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, keseluruhan target memiliki capaian dengan klasifikasi capaian sangat baik. Hanya ada satu indikator yang memiliki capaian dibawah 100% dan selebihnya memiliki capaian diatas 100%.



Gambar 3. 15
Capaian Kinerja Indikator

a. Persentase Jalan Mantap

Berdasarkan hasil survey IRMS yang telah dilakukan, ditemukan bahwa Persentase kemantapan jalan provinsi pada Tahun 2017 sebesar 71,05%. Hal ini menunjukkan bahwa telah tercapainya target persentase jalan mantap provinsi ini. Dalam keberhasilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mencapai target dalam Indikator Kinerja Utama ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Pengalokasian sejumlah anggaran untuk program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Pada Tahun 2017, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan memiliki pagu dana sebesar Rp 147.936.486.696,- atau sebesar 45,2% dari total APBD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sedangkan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mendapat porsi sebesar Rp. 33.602.461.200,- atau sebesar 10.27%. Dengan keterbatasan dana yang tersedia, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan pembangunan dan peningkatan ruas jalan sesuai dengan kebutuhan atau standar jalan provinsi. Sehingga target 71% dapat tercapai.
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memiliki komitmen dalam mewujudkan infrastruktur jalan dan jembatan dengan kualitas terbaik. Hal ini didukung dengan keberadaan UPTD Balai Pengujian Konstruksi dan Lingkungan yang telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi sejak tanggal 15 Maret 2012.
3. Unit Layanan Gangguan yang siap 24 jam untuk mengatasi bencana alam serupa banjir/longsor yang tersebar di 18 Kabupaten/Kota.
4. Adanya kegiatan Rehab/Pemeliharaan Rutin yang setiap tahunnya menjaga kemantapan jalan dengan panjang jalan yang dipelihara sepanjang 1248.97 km
5. Adanya pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan.

Peningkatan kondisi kemantapan jalan ini memberikan pengaruh pada :

- Meningkatnya kecepatan kendaraan sehingga mempengaruhi waktu tempuh rata-rata (waktu perjalanan) menjadi lebih singkat

- Menurunnya nilai biaya transportasi untuk pengguna jalan, yaitu nilai Biaya Operasi Kendaraan (BOK)
- Meningkatnya pelayanan jalan seperti kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan.

b. Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan

Indikator ini merupakan salah satu indikator dengan klasifikasi sangat baik namun memiliki penurunan capaian indikator. Capaian indikator ini adalah sebesar 87.5%. Dalam keberhasilan pencapaian indikator ini ada beberapa hal yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

- Pada Tahun 2017 dana yang digunakan untuk mendukung pencapaian indikator ini sebesar Rp 127.673.692.500,- atau sebesar 35.27% dari total pagu anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dengan anggaran yang ada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang harus juga mengalokasikan sejumlah dana untuk pembangunan bangunan strategis lainnya yang sedang dalam progres pembangunan seperti Pembangunan Stadium Utama Sumatera Barat dan Pembangunan Gedung Kebudayaan yang membutuhkan alokasi dana besar. Sehingga perlu dipilah prioritas bangunan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu sepanjang Tahun 2017.
- Pengawasan dan kontrol langsung dari pimpinan terkait penyelesaian pekerjaan

Adapun penyebab penurunan kinerja pada indikator ini disebabkan adanya hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pekerjaan, yaitu adanya Kelalaian Kontraktor pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB Provinsi Sumatera Barat (Tahap Akhir) dan pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan (Lanjutan). Adapun solusi yang telah dilakukan yaitu penelesaian denda kepada kontraktor terkait.

c. Persentase cakupan air minum

Dalam pencapaian kinerja seksi air minum pada tahun 2017, target yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam pelayanan air minum, terjadi peningkatan dalam pelayanan kinerja SPAM Regional dan tersedianya Database Air Minum untuk kab/kota se Sumatera Barat. Hal – hal yang mendukung dalam pencapaian target 2017 ini adalah:

- Adanya pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan, terutama oleh PPTK. Setiap keterlambatan pekerjaan oleh pelaksanaan segera ditindak lanjuti dan dicari sosialisasi.
- Koordinasi dengan stakeholder seperti bupati/walikota dan jajarannya harus intens dilakukan, khususnya dalam penyusunan para perencanaan SPAM Regional Kab.Agam-kota Bikittinggi. Permasalahan terjadi karena sulitnya mencari sumber air dengan debit besar dan tidak menimbulkan konflik sosial. Untuk mengatasi permasalahan ini, survey awal kelokasi sumber perlu dilakukan dan koordinasi sampai ke level Nagari.

Dalam pencapaian kinerja efisiensi terhadap sumber daya telah dilakukan dengan memanfaatkan komunikasi via email/hp sebagai alat koordinasi. Program/kegiatan penunjang keberhasilan pencapaian kinerja ini adalah dengan adanya kegiatan pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang keciptaan karya, sehingga dengan kegiatan ini pengawasan terhadap kegiatan dan koordinasi internal dapat dilaksanakan dengan optimal.

d. Persentase cakupan sanitasi

Peningkatan layanan terhadap akses sanitasi sudah menjadi prioritas nasional bahkan merupakan universal akses (SDG'S) dengan target akses sanitasi 100% pada tahun 2019. Target nasional tahun 2019 telah terdistribusi menjadi target provinsi dimana provinsi Sumatera Barat memperoleh target sanitasi sebesar 53%, dimana target inipun telah terdistribusi menjadi target sanitasi Kabupaten/Kota.

Secara target, Provinsi Sumatera Barat telah mencapai target yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, namun upaya peningkatan pencapaian akses sanitasi belum dapat kita laksanakan pada tahun 2017 ini dengan baik dan maksimal dikarenakan tidak

adanya anggaran sektor sanitasi pada APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2017. Baru pada perubahan APBD Provinsi 2017, kita anggarkan untuk DED drainase primer/lintas kabupaten kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Walaupun demikian, melalui pembentukan Pokja Sanitasi Provinsi, Kita dapat berperan aktif dalam setiap kegiatan kePokjaan terutama yang melibatkan Pokja Sanitasi Kabupaten Kota sehingga pembinaan dan pendampingan terhadap pencapaian akses sanitasi Kabupaten Kota dapat terus ditingkatkan.

Disamping itu juga dibina hubungan antar instansi terutama yang terlibat langsung dalam pencapaian akses sanitasi terutama Dinas Kesehatan yang melakukan upaya peningkatan akses sanitasi melalui perubahan perilaku masyarakat yang biasa dikenal melalui program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

e. Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan rencana pembangunan

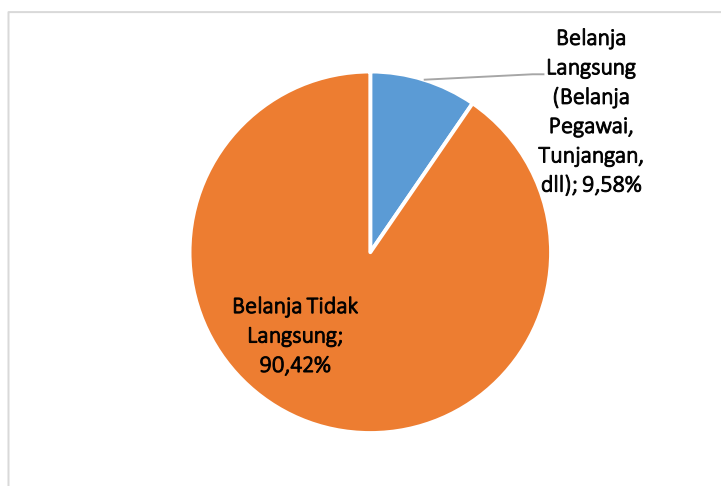
Dengan tercapainya target kesesuaian program antara rencana pembangunan, dalam hal ini kami mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) dengan rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRW), dapat disimpulkan bahwa dokumen perencanaan telah disusun dengan baik sesuai dengan arahan dari Bappenas yakni penyusunan dokumen perencanaan pembangunan harus terintegrasi dengan dokumen rencana tata ruang, sehingga terdapat sinkronisasi program diantara kedua dokumen perencanaan.

Adapun fungsi rencana tata ruang adalah sebagai kerangka pembangunan, dimana program pembangunan harus mengacu pada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan.

Disamping itu, dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pembangunan maupun dokumen rencana tata ruang dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) baik dari pihak perangkat daerah (OPD) selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif.

3.5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;

Pagu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 adalah sebesar Rp 361.958.573.304 dengan komposisi 9,58% digunakan untuk belanja tidak langsung dan 90,42% untuk belanja langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat di Sumatera Barat.



Gambar 3. 16
Persentase Belanja Tahun Anggaran 2017

Dari Pagu awal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melakukan efisiensi pada Perubahan DPA sebesar Rp 25.890.944.967.

Beberapa upaya percepatan dan efisiensi yang dilakukan sepanjang Tahun 2017 atas instruksi Kepala Dinas adalah sebagai berikut :

- Mempercepat proses pengadaan lahan untuk proyek-proyek strategis dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dapat diterima masyarakat
- Menyusun dan menyiapkan administrasi (teknik dan keuangan) untuk percepatan penyerapan anggaran
- Adanya pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan fisik kegiatan di lapangan

Rincian Efisiensi sesuai dengan Indikator Sasaran :

1. Persentase Kemantapan Jalan efisiensi terdiri dari :
 - a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 8.135.751.575,-
 - b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebesar Rp. 5.647.538.800,-

2. a. Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Tata Pemerintahan efisiensi terdiri dari :
 - Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 12.016.307.500,-
- b. Persentase Cakupan Air Minum efisiensi terdiri dari :
 - Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah bertambah sebesar Rp. 367.128.000,-
- c. Persentase Cakupan Sanitasi efisiensi terdiri dari :
 - Program/Kegiatan berada pada Kabupaten / Kota.
3. Persentase Kesesuaian Program Rencana Pembangunan dengan Program RTRW Provinsi efisiensi terdiri dari :
 - a. Program Perencanaan Tata Ruang bertambah sebesar Rp. 115.381.600,-
 - b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang bertambah sebesar Rp. 45.746.900,-

Program yang tidak termasuk dalam Indikator Sasaran adalah program penunjang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

3.6. Realisasi Anggaran

3.6.1. Capaian Realisasi Fisik

Berikut capaian realisasi fisik Tahun 2017.

Tabel 3. 23
Realisasi Fisik Program dan Kegiatan Tahun 2017

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA			Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan	
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp	SISA Rp.	Realisasi (%)	Kinerja	Realisasi (%)	Kinerja
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.721.877.086	3.526.811.656	195.065.430	100	sangat baik	94.76	Sangat Baik
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.470.415.000	1.1217.443.799	252.971.201	100	sangat baik	82.80	Baik
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	313.729.000	297.440.000	16.289.000	100	sangat baik	94.81	Sangat Baik
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	245.652.000	222.963.691	22.688.309	100	sangat baik	90.76	Sangat Baik
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	786.299.755	774.133.330	12.166.425	100	sangat baik	98.45	Sangat Baik
6.	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset	785.854.000	714.414.412	71.439.588	100	sangat baik	90.91	Sangat Baik
7.	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	147.936.486.696	132.545.083.781	15.391.402.915		sangat baik	89.60	Sangat Baik
8.	Program Rehab/Pemel Jalan dan Jembatan	33.602.461.200	32.198.343.328	1.404.117.872		sangat baik	95.82	Sangat Baik
9.	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Ke Bina Margaan	1.312.601.150	1.273.019.147	39.582.003		sangat baik	96.98	Sangat Baik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA			Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan	
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp	SISA Rp.	Realisasi (%)	Kinerja	Realisasi (%)	Kinerja
10.	Program Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah	4.917.128.000	4.229.953.450	687.174.550	99,56	sangat baik	86.02	Sangat Baik
11.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota	127.673.692.500	119.883.672.540	7.790.019.960	98,78	sangat baik	93.90	Sangat Baik
12	Program Peningkatan dan Pengembangan Jasa Konstruksi	802.801.850	747.414.934	55.386.916	91,50	sangat baik	93.10	Sangat Baik
13	Program Pengembangan Kinerja Penyelenggaraan Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan	377.291.500	281.227.933	96.063.567	43,94	Kurang	74.54	Baik
14	Program Perencanaan Tata Ruang	2.665.381.600	2.442.375.041	223.006.559	100	sangat baik	91.63	Sangat Baik
15	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	145.746.900	112.709.383	33.037.517	100	sangat baik	77.33	Baik
16	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	299.566.000	242.229.862	57.336.138	100	sangat baik	80.86	Baik
17	Program Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Provinsi	221.766.000	211.191.330	10.574.670	100	sangat baik	95.23	Sangat Baik

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI DANA			Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan	
		ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp	SISA Rp.	Realisasi (%)	Kinerja	Realisasi (%)	Kinerja
	JUMLAH	361.958.573.304	335.323.949.259	26.634.624.045				

Hasil evaluasi **capaian kinerja fisik** terhadap 17 (tujuh belas) program diatas, diketahui bahwa terdapat 16 (tujuh belas) program yang berkinerja sangat baik.

3.6.2. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3. 24
Realisasi Keuangan Tahun 2017

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
BELANJA LANGSUNG				327.274.750.237	97,01	300.920.427.311	91,95			26.354.322.926
Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan anggaran kas	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan sesuai dengan anggaran kas	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	3.721.877.086	100,00	3.526.811.656	94,76			195.065.430
			PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	6.540.000	100,00	6.051.910	92,54			488.090
			PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	1.652.800.000	100,00	1.531.007.943	92,63			121.792.057
			PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN, PENGAMANAN DAN SOPIR KANTOR	1.158.410.286	100,00	1.135.309.014	98,01			23.101.272
			PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	157.252.000	100,00	139.097.880	88,46			18.154.120
			PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	104.874.800	100,00	83.710.270	79,82			21.164.530
			PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	21.000.000	100,00	19.404.050	92,40			1.595.950
			PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	21.000.000	100,00	20.910.000	99,57			90.000
			RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAERAH DAN KELUAR DAERAH	536.000.000	100,00	527.370.589	98,39			8.629.411

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
			PENYEDIAAN JASA INFORMASI, DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	64.000.000	100,00	63.950.000	99,92			50.000
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	1.470.415.000	94,60	1.217.443.799	82,80			252.971.201
			PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	7.000.000	100,00	6.640.000	94,86			360.000
			PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA GEDUNG KANTOR	1.006.065.000	78,38	788.586.000	78,38			217.479.000
			PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA KENDARAAN DINAS / OPERASIONAL	376.200.000	100,00	367.665.339	97,73			8.534.661
			PEMELIHARAAN RUTIN / BERKALA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	81.150.000	100,00	54.552.460	67,22			26.597.540
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	313.729.000	100,00	297.440.000	94,81			16.289.000
			PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA	313.729.000	100,00	297.440.000	94,81			16.289.000
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	245.652.000	100,00	222.963.691	90,76			22.688.309
			BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	245.652.000	100,00	222.963.691	90,76			22.688.309
			PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	786.299.755	100,00	774.133.330	98,45			12.166.425
			PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	74.999.755	100,00	69.383.330	92,51			5.616.425

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
			PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	711.300.000	100,00	704.750.000	99,08			6.550.000
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN DAN ASSET	785.854.000	100,00	714.414.412	90,91			
			PENYUSUNAN PERANCANGAN DAN PENGANGGARAN SKPD	285.500.000	100,00	278.187.376	97,44			7.312.624
			MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	220.000.000	100,00	195.995.993	89,09			24.004.007
			PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASET SKPD	280.354.000	100,00	240.231.043	85,69			40.122.957
Meningkatnya Konektivitas dan Aksesibilitas Wilayah	Persentase Jalan Mantap	Perbandingan Jumlah Mantap Jalan Provinsi dibandingkan dengan Total Panjang Jalan Provinsi (Km) dikalikan 100 %	PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	147.931.486.696		132.545.083.781	89,60			15.386.402.915
			PERENCANAAN PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN	2.016.237.600	100,00	1.774.664.200	88,02			241.573.400
			PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT	943.892.575	100,00	940.202.200	99,61			3.690.375
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA PADANG DAN KAB. PESISIR SELATAN	7.904.693.100	100,00	7.899.202.700	99,93			5.490.400
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. PADANG PARIAMAN DAN KOTA PARIAMAN	6.500.000.000	100,00	6.409.621.700	98,61			90.378.300
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK	10.404.167.100	100,00	10.397.202.375	99,93			6.964.725
			PEMBANGUNAN JALAN DI WILAYAH KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	5.534.438.600	100,00	5.532.022.500	99,96			2.416.100

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
			PEMBANGUNAN JALAN DI WILAYAH KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT	12.205.914.600	100,00	12.197.982.750	99,94			7.931.850
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	7.632.688.100	100,00	7.621.307.850	99,85			11.380.250
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KOTA SAWAHLUNTO DAN KAB. TANAH DATAR	5.792.732.000	100,00	5.785.254.775	99,87			7.477.225
			PEMBANGUNAN JEMBATAN STRATEGIS WILAYAH-I	12.388.598.000	100,00	7.124.787.000	57,51	Penandatanganan kontrak baru dapat dilaksanakan pada Bulan September karena Paket diberi tanda bintang (*) menunggu APBD Perubahan TA 2017 dan dokumen lingkungan. Sehingga waktu yang tersisa untuk pelaksanaan kontrak tidak memungkinkan untuk menyerap seluruh dana yang tersedia		5.263.811.000

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
								di DPA		
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. AGAM DAN KOTA BUKITTINGGI	5.739.661.000	100,00	5.734.122.300	99,90			5.538.700
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. SOLOK SELATAN	5.939.807.000	100,00	5.939.063.000	99,99			744.000
			PEMBANGUNAN JALAN PROVINSI DI WILAYAH KAB. KEP. MENTAWAI	5.570.700.000	100,00	5.568.440.000	99,96			2.260.000
			PENGAWASAN PEMBANGUNAN JALAN & JEMBATAN PROVINSI	5.200.000.000	100,00	4.992.268.725	96,01			207.731.275
			PENGENDALIAN PELAKSANAAN JALAN / JEMBATAN DI SUMATERA BARAT	400.000.000	100,00	392.009.454	98,00			7.990.546
			PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN JALAN / JEMBATAN PROVINSI	1.450.000.000	100,00	219.530.665	15,14	Peta bidang terbit tanggal 21 Desember 2017 sehingga penilaian harga oleh Appraisal tidak		1.230.469.335

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
								dapat dilaksanakn pada tahun anggaran ini		
			PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS	3.993.238.271	1,30	51.931.396	1,30	Untuk lokasi Convention Hall, Kesesuaian Tata Ruang belum terbit sehingga proses pengadaan lahan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan untuk jembatan kurangi, masih terdapat sengketa lahan dan putusan pengadilan baru terbit Oktober 2017 sehingga proses pengadaan belum dapat		3.941.306.875

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
								dilaksanakan		
			PEMBANGUNAN JEMBATAN STRATEGIS WILAYAH-II	16.384.758.350	63,18	12.038.838.700	73,48	Kelalaian kontraktor pada Paket Pembangunan Jembatan Barulak dan Jembatan Batang Ketek (P.079)	Berlakukan denda maksimal 50 hari sesuai Kepres	4.345.919.650
			PENINGKATAN JALAN PROVINSI DAK	31.929.960.400	100,00	31.926.631.491	99,99			3.328.909
			PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	33.603.461.200		32.198.343.028	95,82			1.405.118.172
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PASAMAN DAN KAB. PASAMAN BARAT	3.317.664.000	100,00	3.315.112.504	99,92			2.551.496
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA BUKITTINGGI DAN AGAM TIMUR	2.300.000.000	100,00	2.299.029.000	99,96			971.000
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. 50 KOTA DAN KOTA PAYAKUMBUH	2.000.000.000	100,00	1.999.444.538	99,97			555.462
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. TANAH DATAR DAN KOTA PADANG PANJANG	2.000.000.000	100,00	1.999.966.465	100,00			33.535

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PADANG PARIAMAN, KOTA PARIAMAN, KOTA PADANG	1.100.000.000	100,0 0	1.097.036.800	99,73			2.963.200
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. SOLOK DAN KOTA SOLOK	1.800.000.000	100,0 0	1.799.938.350	100,0 0			61.650
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB SOLOK SELATAN	2.000.000.000	100,0 0	1.999.988.250	100,0 0			11.750
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KOTA SAWAHLUNTO, KAB. SIJUNJUNG DAN KAB. DHARMASRAYA	2.700.000.000	92,59	2.499.863.397	92,59			200.136.603
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. PESISIR SELATAN	700.000.000	100,0 0	699.993.713	100,0 0			6.287
			REHABILITASI / PEMELIHARAAN RUTIN JEMBATAN PROVINSI DAN BANGUNAN PELENGKAP JALAN	3.300.000.000	100,0 0	2.338.235.675	70,86			961.764.325
			PENGENDALIAN PELAKSANAAN REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	196.222.200	100,0 0	189.924.701	96,79			6.297.499
			PEMELIHARAAN PERALATAN JALAN DAN JEMBATAN	250.000.000	100,0 0	238.696.750	95,48			11.303.250
			PENANGANAN KONDISI KRITIS JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI	2.700.000.000	100,0 0	2.529.772.335	93,70			170.227.665
			REHAB / PEMEL RUTIN JALAN PROVINSI DI KAB. AGAM	2.400.000.000	100,0 0	2.399.300.100	99,97			699.900
			PEMELIHARAAN BERKALA JALAN	6.839.575.000	100,0 0	6.792.040.450	99,31			47.534.550
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN	1.312.601.150	100,0 0	1.273.019.147	96,98			39.582.003

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
			PENGADAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN	882.282.000	100,00	865.263.268	98,07			17.018.732
			MONITORING PENGENDALIAN MUTU UPTD	282.042.050	100,00	262.048.350	92,91			19.993.700
			PEMELIHARAAN ALAT-ALAT UKUR DAN LABORATORIUM KE BINA MARGAAN	148.277.100	100,00	145.707.529	98,27			2.569.571
Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan aparatur serta pelayanan dasar masyarakat	Persentase cakupan air minum	Rata-rata perbandingan jumlah penduduk terlayani air minum di kabupaten/kota dibandingkan jumlah penduduk kabupaten/kota kali 100%.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	4.917.128.000	99,65	4.229.953.450	86,02			687.174.550
			PENYUSUNAN DED DAN AMDAL SPAM REGIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT	98.530.000	100,00	91.984.450	93,36			6.545.550
			PENINGKATAN KINERJA PELAYANAN SISTEM PELAYANAN AIR MINUM (SPAM) DI PROVINSI SUMATERA BARAT WILAYAH I	4.268.598.000	98,58	3.706.382.643	86,83	Pekerjaan Pra Perencanaan SPAM Regional Agam - Bukittinggi tidak jadi dilaksanakan karena masih tanggungjawab konsultan perencana		562.215.357
			PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	400.000.000	100,00	293.586.477	73,40			106.413.523
			UPDATING DATABASE BIDANG KECIPTAKARYAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT	150.000.000	100,00	137.999.880	92,00			12.000.120
	Persentase cakupan sanitasi	Rata-rata perbandingan jumlah rumah	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE KEWENANGAN PROVINSI	221.766.000	100,00	211.191.330	95,23			10.574.670

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
		tangga terlayani sanitasi di kabupaten/kota dibandingkan jumlah rumah tangga kabupaten/kota kali 100%.	PEMBANGUNAN DRAINASE LINTAS KABUPATEN/KOTA	221.766.000	100,00	211.191.330	95,23			10.574.670
	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan	Jumlah sarana dan prasarana penunjang tata pemerintahan terbangun (siap ditempati), yang terdiri atas bangunan strategis, gedung negara dan rumah negara.	PROGRAM PENYELANGGARAAN PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN DI KAWASAN STRATEGIS DAERAH PROVINSI DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	127.673.692.500	99,32	119.883.672.540	93,90			7.790.019.960
			REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA I	48.096.279.000	98,18	47.112.483.400	97,95	Kelalaian Kontraktor pada Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Pemberdayaan Wanita dan KB Provinsi Sumatera Barat (Tahap Akhir)	Berlakukan denda maksimal 50 hari sesuai Kepres	983.795.600
			REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA II	8.393.329.600	99,00	8.002.983.947	95,35	Kelalaian kontraktor pada paket pekerjaan Pembangunan Gedung Dinas Kelautan dan Perikanan	Berlakukan denda maksimal 50 hari sesuai Kepres	390.345.653

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
								(Lanjutan)		
			REKONSTRUKSI BANGUNAN PASCA BENCANA III	13.188.252.200	100,0 0	11.652.724.533	88,36			1.535.527.667
			LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG PENGENDALI INFLASI	2.832.463.500	100,0 0	2.825.522.800	99,75			6.940.700
			LANJUTAN PEMBANGUNAN MAIN STADIUM UTAMA SUMATERA BARAT	15.000.000.000	100,0 0	11.104.134.650	74,03			3.895.865.350
			LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL SUMATERA BARAT	9.930.752.000	100,0 0	9.859.617.500	99,28			71.134.500
			LANJUTAN PEMBANGUNAN GEDUNG KEBUDAYAAN SUMATERA BARAT	25.000.000.000	100,0 0	24.389.815.700	97,56			610.184.300
			PEMBANGUNAN KEMBALI RUMAH DINAS TNI AD	200.000.000	100,0 0	195.875.500	97,94			4.124.500
			PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN TEKNIS (TPT) BANGUNAN NEGARA DI SUMATERA BARAT	200.000.000	100,0 0	164.359.700	82,18			35.640.300
			PEMBANGUNAN SHELTER EVAKUASI TSUNAMI WILAYAH I	645.590.000	100,0 0	587.629.250	91,02			57.960.750

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
			PERENCANAAN BANGUNAN GEDUNG	878.585.000	94,00	733.866.860	83,53	Pelaksanaan kegiatan HPN tidak jadi dilaksanakan di stadion Gor H. Agus Salim sehingga DED Rehabilitasi GOR H. Agus Salim tidak jadi dilaksanakan		144.718.140
			PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG	2.608.522.500	100,00	2.579.586.900	98,89			28.935.600
			PEMBANGUNAN PRASASTI APDN LAMA	699.918.700	100,00	675.071.800	96,45			24.846.900
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	802.801.850	100%	747.414.934	93,10			55.386.916
			MONITORING DAN PENGAWASAN PERIZINAN UTILITAS UMUM	142.127.000	100,00	130.105.846	91,54			12.021.154
			KEGIATAN PROFIL JASA KONTRUKSI	96.060.750	100,00	89.634.340	93,31			6.426.410
			KEGIATAN LOKAKARYA, SOSIALISASI DAN FORUM KOMUNIKASI JASA KONTRUKSI	184.199.700	100,00	163.085.600	88,54			21.114.100
			KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS/WORKSHOP JASA KONTRUKSI	380.414.400	100,00	364.589.148	95,84			15.825.252
			PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENYELENGARAAN PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN	377.291.500	100,00	281.227.933	74,54			96.063.567

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN
			KEGIATAN PENILAIAN LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG (TABG)	282.801.000	100,00	192.386.408	68,03	Realisasi keuangan 68,03% disebabkan oleh : (1) Alokasi anggaran sewa gedung tidak cukup untuk menyewa satu ruangan, dan (2) Honorarium yang bisa direalisasikan hanya 7 bulan disebabkan adanya revisi SK Gubernur	Untuk tahun mendatang, diupayakan ketersediaan anggaran sesuai kebutuhan dan standar biaya; serta masa yang akan datang usulan SK Tim TABG dilakukan lebih awal	90.414.592
			ASESMEN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKASI LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	94.490.500	100,00	88.841.525	94,02			5.648.975
Meningkatnya pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya	Persentase kesesuaian program rencana pembangunan dengan program RTRW Provinsi	Jumlah kesesuaian program rencana pembangunan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat	PROGRAM PERENCANAAN PENATAAN RUANG	2.665.381.600	100,00	2.442.375.035	91,63			223.006.565
			REVISI RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT	724.113.100	100,00	693.996.107	95,84			30.116.993
			PENYUSUNAN RENCANA DETIL TATA RUANG (RDTR)	473.580.800	100,00	453.081.975	95,67			20.498.825
			PENYUSUNAN ZONASI SISTEM PROVINSI	703.916.400	100,00	685.820.900	97,43			18.095.500

ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PROGRAM / KEGIATAN	PAGU RP.	FISIK	REALISASI	%	PERMASALAHAN	SOLUSI	SISA ANGGARAN	
dukung dan daya tampung		dibandingkan dengan program RTRW Provinsi Sumatera Barat dikalikan 100%	PROSES LEGALISASI RENCANA KAWASAN STRATEGIS PROVINSI (KSP)	463.771.300	100,00	395.337.253	85,24	efisiensi perjalanan dinas	perencanaan RKA yang lebih matang	68.434.047	
			KAMPANYE PUBLIK PENATAAN RUANG	300.000.000	100,00	214.138.800	71,38	keterbatasan waktu, dimana waktu pelaksanaan kampanye hanya 1 bulan sehingga kampanye melalui media cetak tidak tayang 1 x	waktu pelaksanaan diperpanjang	85.861.200	
			PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG	145.746.900	100,00	112.709.383	77,33				33.037.517
			KEGIATAN MONITORING PELAKSANAAN PERDA RTRW DAN PENGAWASAN TEKNIK SPM PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT	145.746.900	100,00	112.709.383	77,33	penganggaran perubahan biaya cetak melebihi biaya riil	penambahan dan penyesuaian SHBJ untuk biaya cetak		33.037.517
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	299.566.000	100,00	242.229.862	80,86				57.336.138
			INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI RETRIBUSI	299.566.000	100,00	242.229.862	80,86			57.336.138	

BAB IV

PENUTUP

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 merupakan cerminan capaian target kinerja dalam rangka menunjang tercapainya sasaran strategis pada tahun selanjutnya. LAKIP disusun berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan terhadap Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang telah ditetapkan sebelumnya. LAKIP ini merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan 17 (tujuh belas) program, meliputi: 12 (dua belas) program utama dan 5 (lima) program pendukung. Pada masing-masing program terdiri dari beberapa kegiatan.

Penilaian kinerja dilakukan terhadap program dan kegiatan berdasarkan realisasi fisik maupun keuangannya. Pada laporan ini, dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif dan dilanjutkan dengan analisis penilaian kinerja secara kuantitatif dengan terlebih dahulu menetapkan kriteria skala kualitatif sehingga dapat diketahui kinerja program/kegiatan secara kualitatif.

Pada tahun anggaran 2017 terdapat (dua) sasaran strategis Dinas yang seluruhnya dapat diukur berdasarkan target indikator kinerjanya masing-masing. Pada umumnya target indikator kinerja yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja sebelumnya dapat tercapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing program.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada LAKIP ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Total penyerapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2017 ini adalah sebesar **92.64%** (Rp. 335.323.949.259,-) dari total pagu anggaran sebesar Rp. 361.958.573.304,-.
2. Dari 17 (tujuh belas) program yang ada pada tahun 2017, pencapaian fisik pekerjaan terlaksana dengan kinerja Sangat baik sebanyak 17 (tujuh belas) program.

3. Kualitas pencapaian kinerja keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat terhadap program-program tahun 2017 yaitu: 13 (tiga belas) program berkinerja Sangat baik, dan 4 (empat) program berkinerja *baik*.
4. Penilaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 ini menjadi salah satu bahan untuk pengukuran kinerja Pemerintah Provinsi sesuai Penetapan Kinerja yang ada.
5. Kendala-kendala yang dihadapi pada tahun 2017 dapat dijadikan cermin untukantisipasi pada tahun-tahun berikutnya.

Padang, Januari 2018
Kepala Dinas

Ir. Fathol Bari, M.Sc.Eng
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640515 199003 1 010